

LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi Publikasi Berita PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA pada Konsultasi Publik melalui Website SIMAS PUU (puuekkkukesra.dpr.go.id)



Disusun oleh:

Nama : Dea Adelia, S.H.
NIP : 199301282025062001
Unit Kerja : Pusat Perancang Undang-Undang
Ekkuinbangkesra
Jabatan : Perancang Undang-Undang Ahli Pertama

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XVIII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi Publikasi Berita PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA pada Konsultasi
Publik melalui Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)

Disusun oleh:

Nama : Dea Adelia, S.H.
NIP : 199301282025062001
Unit Kerja : Pusat Perancang Undang-Undang
Ekkuinbangkesra
Jabatan : Perancang Undang-Undang Ahli Pertama

Telah diseminarkan Evaluasi Aktualisasi pada
Jakarta, 14 November 2025

Mengetahui
Coach



Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si.
NIP.199010032018011002

Menyetujui
Mentor



Meirina Fajarwati, S.H., M.H.
NIP.199105062014022002

Mengetahui
Penguji



Agus Supriyono, S.S., M.A.P
NIP. 196902082003121003

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan atas Rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi ini yang berjudul “Optimalisasi Publikasi Berita PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA pada Kegiatan Konsultasi Publik melalui Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)”. Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan laporan aktualisasi ini juga tentunya tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI;
- 2) Bapak Akhmad Aulawi, S.H., M.H. selaku koordinator bidang di Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI ;
- 3) Mba Meirina Fajarwati, S.H., M.H. selaku mentor yang senantiasa mendampingi dan membimbing hingga Penulis menyelesaikan kegiatan aktualisasi;
- 4) Mas Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. selaku *coach* yang telah banyak memberikan arahan selama kegiatan Latsar;
- 5) Suami Penulis, Putra Rahmat Purna, S.H., M.H. Terima kasih selalu mendukung penulis di setiap perjalanan yang penulis lalui;
- 6) Mba Laksmi Harundani, S.H., M.H. Terima kasih telah membantu penulis untuk menyesuaikan tema dan isi tulisan untuk diselaraskan pada bidang media sosial.
- 7) Seluruh senior di Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA) yang selalu memberikan dukungan dan kooperatif kepada Penulis;
- 8) Seluruh rekan-rekan Latsar Angkatan XVIII, khususnya kepada Kelompok 1 Adit, Bagus, Mas Angga, Affiyah dan Mels yang telah berjuang bersama-sama selama kegiatan Latsar; dan
- 9) Teman-teman CPNS di Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), Cirol, Jejes, Biki, Desti, Dinda, Nadia, Farah, Imron, Fahmi dan Gavin.

Jakarta, 12 September 2025

Peserta,
Dea Adelia, S.H.

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II.....	5
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	5
Visi dan Misi Organisasi	6
A. Struktur Organisasi	7
B. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	10
BAB III.....	12
PENETAPAN ISU PRIORITAS	12
A. Identifikasi Isu	17
1. Isu Ke-1	23
2. Isu Ke-2	25
3. Isu Ke-3	36
B. Penetapan Isu Prioritas.....	37
1. Teknik Analisis Isu	41
2. Pemilihan Isu Prioritas	35
C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu.....	38
D. Rekomendasi Penyelesaian Isu	39
BAB IV.....	41
RANCANGAN AKTUALISASI	41
A. Matrix Rancangan Aktualisas	41
B. Stakeholder.....	60
C. Kendala dan Strategi menghadapi Kendala	60
D. Analisis Dampak.....	61
E. Jadwal Kegiatan	62
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI	65
A. Jadwal Pelaksanaan.....	65
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	67
1. Melakukan Identifikasi dan Pengumpulan Informasi	67
2. Penyusunan Template Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) untuk kegiatan Konsultasi Publik	66
3. Menyusun SOP Sederhana Mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)	73
4. Melaksanakan Finalisasi Publikasi Percobaan Berita Hasil Konsultasi Publik..	80
5. Sosialisasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) di Pusat PUU Ekkuinbangkesra.....	
C. Stakeholders.....	96
D. Kendala dan Strategi.....	96
E. Analisis Dampak.....	97

BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
Lampiran.....	101
Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Mentoring	102
Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching	118
Lampiran 3. Laporan Mingguan Aktualisasi.....	112
Lampiran 4. Laporan Singkat Sosialisasi Hasil Aktualisasi	121
Lampiran 5. LABN	152

Daftar Tabel

Tabel 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Tabel 2. Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI

Tabel 3. Struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang Ekkuinbangkesra

Tabel 4. Matrik rancangan Aktualisasi

Tabel 5. Kendala dan Strategi

Table 6. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan

Tabel 7. Matrik Jadwal Kegiatan

Tabel 8. Kendala dan Strategi Aktualisasi

Daftar Gambar

Gambar 1. Belum adanya fitur penambahan hasil materi paparan dari pakar (ISU 1)

Gambar 2. Artikel Berita yang mendukung penulis untuk mengambil Isu Kedua sebagai Isu Utama (ISU 2)

Gambar 3. Halaman Awal Bagian SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID), sebagai objek penelitian dari

penulis untuk melakukan penelitian dalam optimalisasi publikasi berita di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (ISU 2)

Gambar 4. Pertemuan dengan Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI. Bersama dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H. Selaku Pimpinan Tim Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dan CPNS 2025 dalam tema “Pembahasan Tema Aktualisasi Berdasarkan Kebutuhan Pusat PUU Ekuinbangkesra dan Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi PUU” - 17.09.2025.

Gambar 5. Pertemuan dengan Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI. Bersama dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H. Selaku Pimpinan Tim Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dan CPNS 2025 dalam tema “Pembahasan Tema Aktualisasi Berdasarkan Kebutuhan Pusat PUU Ekuinbangkesra dan Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi PUU” - 17.09.2025.

Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H. (Ketua Tim Website Pusat PUU Ekuinbangkesra - Selasa, 16 September 2025 (10.30 WIB).

Gambar 7. Isu 2 Halaman Utama dari Website PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID DPR RI (Belum terdapat kolom berita yang menunjukkan kegiatan dari Pusat PUU Ekuinbangkesra).

Gambar 8. Hasil Tangkap Layar dari Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) terkait efektifitas daftar pertanyaan SIMAS PUU (ISU 3).

Gambar 9. Teknik Fishbone membedah “Optimalisasi Publikasi Berita Konsultasi Publik di SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)”.

Gambar 10. Dokumentasi Pengumpulan data dan informasi.

Gambar 11. Dokumentasi pengumpulan data informasi

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Konsultasi dengan Mentor (Minggu 1)

Gambar 13. Contoh Template Berita (1)

Gambar 14. Contoh Template Berita (2)

Gambar 15. Indikator Berita yang Baik

Gambar 16. Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU

Gambar 17. Contoh Berita (1)

Gambar 18. Contoh Berita (2)

Gambar 19. Contoh Perbaikan Berita (1)

Gambar 20. Contoh Perbaikan Berita (2)

Gambar 21. Contoh Perbaikan Berita (3)

Gambar 22. Berita setelah proses edit (1)

Gambar 23. Berita setelah proses edit (2)

Gambar 24. Berita Pertama yang dipublikasi di website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gambar 25. Berita Pertama yang dipublikasi di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gambar 26. Berita kedua yang dipublikasi di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, ASN memiliki beberapa tugas, yaitu: a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c) mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada saat ini, era globalisasi dimana cepatnya perkembangan teknologi, ASN dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks dalam berbagai aspek. Hal ini baik dalam aspek teknologi, sosial maupun ekonomi. Pada era saat ini masyarakat lebih kritis dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik serta berkualitas dari yang pernah ada. Karena tantangan semakin bertambah, maka pemerintah terus berupaya dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah satu upaya yang di ambil oleh pemerintah yaitu melakukan transformasi ASN dengan tujuan untuk mewujudkan ASN yang memiliki hasil kerja tinggi disertai dengan perilaku yang berorientasi pada *Core Value*: BERAKHLAK. BERAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi pelayan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. BERAKHLAK menjadi nilai dasar yang wajib untuk diimplementasikan oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hal yang harus dilakukan untuk ASN dalam menghadapi perubahan , ASN perlu untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan hal ini termasuk dalam peningkatan kemampuan secara teknis, hal terkait manajerial, dan sosio-kultural. Dalam pengembangan Kompetensi Berkelanjutan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh ASN. Pada saat ini ASN dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang cepat dan diharapkan memudahkan kinerja dari ASN dalam memberikan pelayanan publik, hal ini termasuk dalam implementasi e-government serta pemanfaatan media sosial untuk menjadi penyalur informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Latihan dasar CPNS merupakan salah satu bentuk perwujudan Pendidikan dan Pelatihan yang telah diatur oleh Undang-Undang ASN. Pelatihan dasar CPNS yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia (SETJEN DPR RI) merupakan langkah awal yang dapat dijadikan sebagai fondasi baik dalam kompetensi pengetahuan serta keterampilan bagi CPNS. Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS memiliki tahap aktualisasi. Tahap aktualisasi tersebut merupakan tahap perwujudan dari nilai-nilai dasar yang telah dipelajari. sebelum memulai tahap aktualisasi, para peserta diberikan tugas untuk merancang aktualisasi yang akan dilaksanakan ditempat kerja.

Penulis yang merupakan CPNS dalam jabatan fungsional Perancang Undang-Undang pada unit Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA) dalam merancang aktualisasi diharapkan dapat memahami tentang tugas dan fungsi ASN, menanamkan dalam diri mengenai nilai-nilai dasar BERAHLAK, serta memberikan gagasan kreatif yang dapat memberikan dampak positif terhadap unit kerja penulis, serta Setjen DPR RI dalam mewujudkan tujuannya untuk memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dalam rangka mendukung fungsi legislasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Publikasi berita dari kegiatan Konsultasi Publik memiliki posisi yang sangat penting. Karena kedua forum ini menjadi ruang partisipatif yang menjembatani aspirasi masyarakat, akademisi, praktisi maupun pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan undang-undang.

Isu-isu yang dibahas dalam Konsultasi Publik berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, baik dalam aspek pertumbuhan ekonomi, tata kelola keuangan negara, Pembangunan berkelanjutan, hingga pemenuhan kesejahteraan sosial. Namun, faktanya di lapangan menunjukan bahwa hasil dan dinamika pembahasan dalam Konsultasi Publik seringkali tidak terdokumentasikan secara sistematis dan belum dapat tersampaikan secara optimal kepada publik.

Informasi yang seharusnya dapat memperkaya pengetahuan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap proses legislasi ternyata masih terbatas pada notula internal atau laporan teknis. Jika dilihat pada prinsip *Good Governance*, nilai-nilai yang terkandung dalam tata kelola pemerintah yang baik terletak pada sisi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi publik. Publik memiliki hak dalam memperoleh akses informasi yang memadai, mudah dijangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), keberadaan Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID.GO.ID) merupakan sebuah wadah untuk menampung partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang. Tujuan dari pembuatan SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID) adalah untuk mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien serta efektif terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang.

Keberadaan dari SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID) menjadi sangat strategis karena dirancang sebagai media publikasi dan manajemen data legislasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Namun sayangnya pemanfaatan dari SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID) belum optimal, karena masih belum terdapat sarana publikasi berita hasil kegiatan PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA, khususnya pada Konsultasi Publik. Hal ini menjadikan tujuan dibuatnya SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID) belum dapat terpenuhi dan terlaksana.

Pusat Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA memiliki tugas pokok dalam menyiapkan, merumuskan, serta menyempurnakan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Namun, peran Perancang Undang-Undang (PUU) tidak berhenti pada aspek teknis normatif saja. Sejalan dengan perkembangan paradigma birokrasi modern, perancang juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi secara lebih komperhensif, termasuk memastikan bahwa substansi hukum yang dihasilkan dapat dipahami dan diakses publik melalui mekanisme diseminasi yang tepat. Maksudnya adalah Perancang Undang-Undang (PUU) berperan sebagai penghubung antara produk hukum yang kompleks dan penyebaran informasi legislasi kepada masyarakat.

Optimalisasi publikasi berita Pusat PUU melalui SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID) merupakan wujud konkret dari pelaksanaan tugas perancang undang-undang dalam mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas proses legislasi. Dengan mengelola dan mempublikasi informasi perkembangan hasil dari Konsultasi Publik secara tepat, cepat dan akurat, perancang undang-undang tidak hanya memperkuat legitimasi proses legislasi melainkan juga memnubuhkan literasi hukum dan politik dalam masyarakat. Publikasi yang baik juga dapat meningkatkan citra kelembagaan DPR RI sebagai Lembaga legislatif yang responsif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Dasar Hukum

Adapun landasan yang menjadi dasar hukum dalam aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi publikasi berita PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA khususnya hasil dari Konsultasi Publik, guna mendukung ketebukaan informasi publik, memperkuat akuntabilitas proses legislasi, serta menegaskan peran Perancang Undang-Undang (PUU) dalam memberikan pelayanan informasi hukum.
2. Menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud pelayanan publik dengan dasar prinsip BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
3. Mengidentifikasi kendala dan kelemahan dalam proses publikasi berita Pusat PUU di dalam Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.GO.ID) dan Menyusun Langkah-langkah optimalisasi publikasi berita Konsultasi Publik agar lebih sistematis, cepat dan informatif.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari adanya penyusunan rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dalam mengelola informasi dan publikasi berita hasil kegiatan Konsultasi Publik secara profesional dan akuntabel.
2. Mendukung dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik dari Pusat Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat informasi publik yang mudah dipahami.
3. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami proses legislasi dan memahami arah kemana kebijakan yang sedang dibahas oleh DPR RI sehingga perwujudan dari Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*).

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI merupakan Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi dari DPR yaitu, “Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel” dimana sebagai penyelenggaraan tugas dengan melaksanakan misi diantaranya: 1) menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk Pembangunan nasional dalam rangka representasi rakyat; 2) memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah. Untuk menjadikan nyata, visi dan misi tersebut maka DPR di support oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam kelancaran pelaksanaan dari wewenang serta tugas DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI dibentuk berdasarkan amanat pasal 413 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) yang berbunyi:

“ Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Lembaga masing-masing.”

Selain itu, Pasal 413 ayat (2) dan ayat (3) UU MD3 juga memerintahkan pembentukan Badan Keahlian DPR RI yang secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR dan secara administrative berada dibawah Sekretariat Jenderal DPR. atas dasar amanat Pasal 413 UU MD3 selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI.

1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

a. Visi

Menjadi Sekretariat Jenderal yang professional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Misi

1. Memberikan dukundan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
2. Melaksanakan tata Kelola kelembagaan pemerintahan yang professional, baik dan bersih dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi Badan Keahlian DPR RI

a. Visi

Menjadi Badan keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
- 2) Menyelenggarakan tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

3. Visi dan Misi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

a. Visi

"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas".

b. Misi

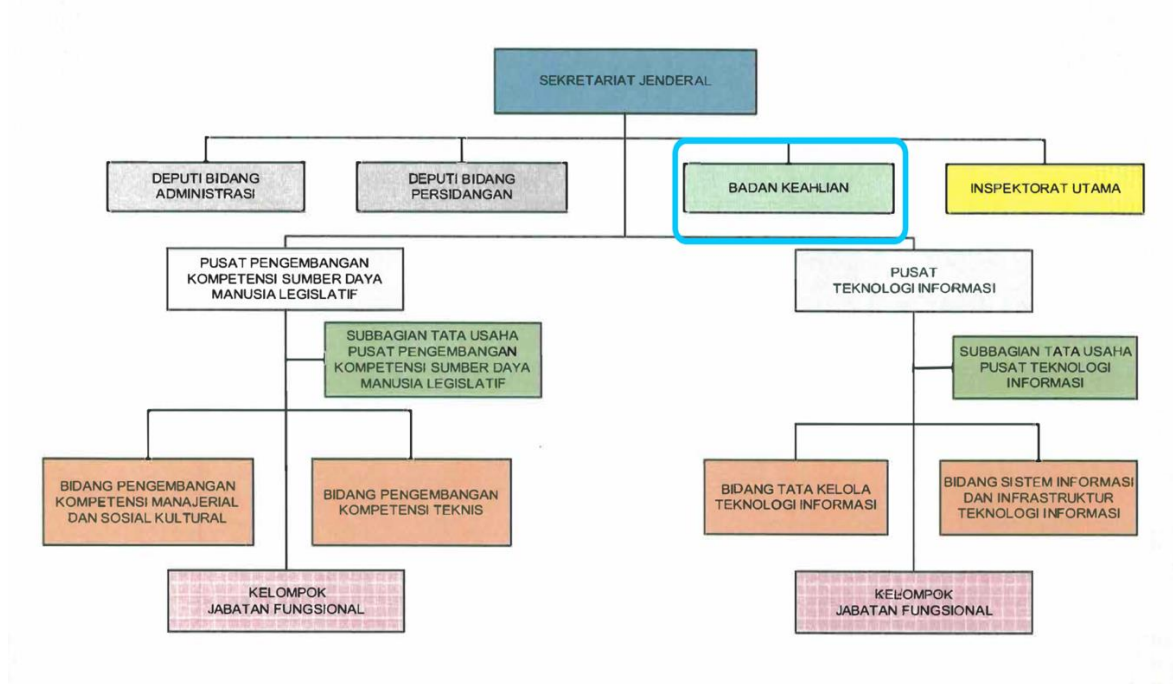
Misi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan
2. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

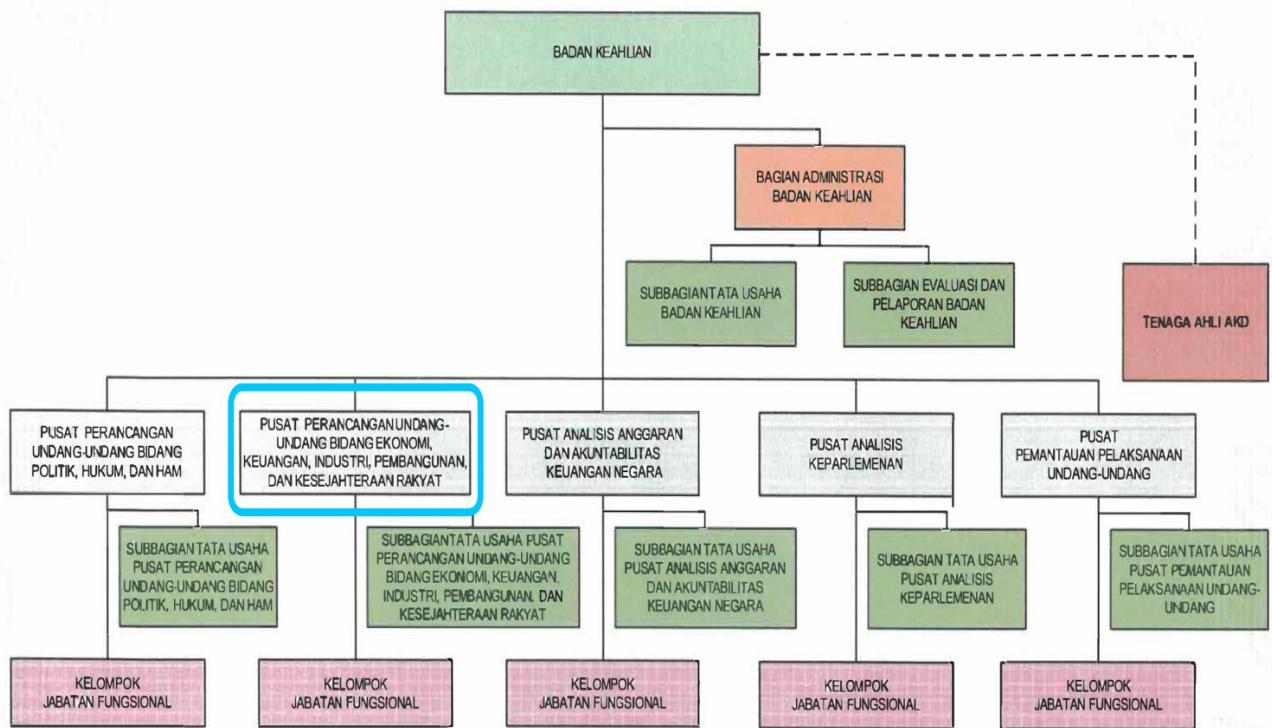
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu Pusat di Badan Keahlian dalam Sekretariat Jenderal DPR RI.

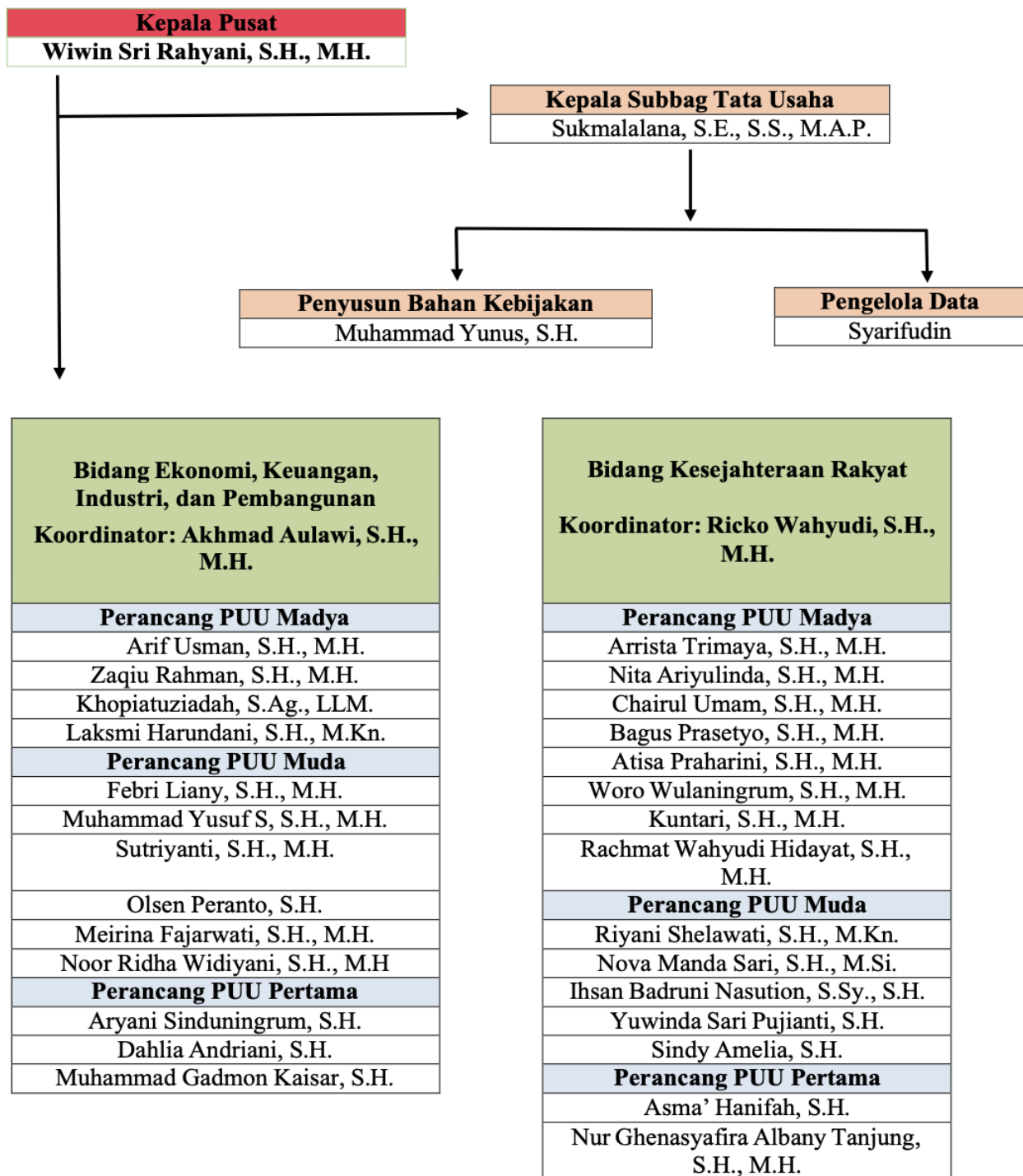
Struktur Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan kelompok Jabatan Fungsional. Keduanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.



Tabel 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI



Tabel 2. Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI



Tabel 3. Struktur Organisasi Pusat Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Permenpan RB No. 65 Tahun 2021) dijelaskan bahwa unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan Sub-unsur dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 1. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 4. Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah;
 5. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
 6. Pemberian tanggapan atau penyusunan laporan/notula/ risalah rapat dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, nota kesepahaman (*memorandum of understanding*), kontrak internasional/ kontrak nasional/ perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan;
 7. Pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
 8. Pemberian konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; dan
 9. Pemetaan produk hukum daerah.
- b. Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya meliputi:
 1. Penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan Menteri, pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian/Lembaga negara, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
 2. Penyusunan perjanjian internasional;

3. Penyusunan persetujuan internasional;
4. Penyusunan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*);
5. Penyusunan kontrak internasional;
6. Penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
7. Penyusunan Keterangan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat, Kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undnag terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun diluar pengadilan; dan
9. Penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*); dan
10. Pemberian mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.

BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

- **Identifikasi Isu**

No.	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN mendukung SMART Governance
1	Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)	Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)) merupakan partisipasi masyarakat berbasis <i>online system</i> guna mewujudkan perancangan	- Apabila hal ini tidak dilakukan maka, Fungsi dari pelaksanaan SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) tidak berjalan sebagaimana mestinya. - Terutama Fungsi SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) pada nomor 3 (tiga) yaitu terkait tentang	- Output dari Konsultasi Publik dapat dipublikasi di Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). - Hasil tersebut bisa menambah kunjungan Website PUU yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam Website PUU , karena masyarakat	Keterkaitan dengan Manajemen ASN: Salah satu asas manajemen ASN sebagaimana disebutkan dalam UU ASN adalah asas profesionalitas, yaitu penyelenggaraan manajemen ASN mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN yang berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai ASN dan pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu, penanganan isu ini akan meningkatkan tanggung jawab dari Perancang Undang-Undang

		undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI.	Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjut secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas. • Apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi nilai-nilai Transparan, Akuntabel, Efisien serta Berintegritas, hal ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap DPR RI secara garis besar, dan terhadap Perancang Undang-Undang (PUU) secara sub bagian daripada	mendapatkan informasi yang transparan dari sisi pakar. yang kemudian diharapkan menjadi semangat dan dorongan masyarakat untuk bisa mengetahui rangkaian proses dari Rancangan Undang-Undang, dimana masyarakat dapat terlibat dan turut berpartisipasi aktif melalui tulisan di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	dalam memberikan kontribusi yang lebih terhadap organisasi sebagai bentuk pengembangan kinerja dan hasil kerja. • Keterkaitan dengan SMART ASN Isu ini menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai entrepreneurship dalam melihat peluang untuk pengembangan perbaikan kinerja dan hasil kerja dari Perancang Perundang-undang. Dimana untuk penambahan fitur untuk Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) terkait dengan penyebaran materi dari pakar seharusnya menjadi objek pengoptimalan dukungan keahlian Perancang Undang-Undang kepada DPR RI dan Publik secara umum.
--	--	---	---	---	--

		• SIMAS PUU (PUUEKKUKES RA.DPR.GO.ID) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Menginformasikan kepada publik penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Badan	DPR RI yang bertanggungjawab dalam pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU). • Berkurangnya rasa percaya masyarakat dapat menimbulkan dampak bagi DPR RI: 1. Turunnya legitimasi politik, karena Proses legislasi akan dianggap elitis dan tertutup. Hal ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR RI. 2. Meningkatnya resistensi publik, UU yang dihasilkan rawan penolakan, protes, hingga gugatan judicial review.		
--	--	---	--	--	--

		Keahlian DPR RI. 2. Menerima masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan draf RUU yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI.	3. Krisis Akuntabilitas, DPR akan menghadapi kesulitan untuk mempertanggungjawabkan proses legislasi karena publik tidak mengetahui dasar argumentasi pakar. 4. Kerentanan disinformasi, ketika informasi resmi tidak disebarkan keruang publik , kemungkinan dalam ruang tersebut diisi oleh hoaks atau framing negative dan hal tersebut lebih mudah menyebar dan dikonsumsi oleh masyarakat.		
--	--	--	---	--	--

		3. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjut secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas. • Se jauh ini SIMAS PUU (PUUEKKUKES RA.DPR.GO.ID) memiliki fitur : a. Database Pakar/Tokoh b. Kelompok Teregister	Dampak bagi Perancang Undang-Undang (PUU): 1. Kualitas regulasi menurun, tanpa masukan dari publik, perancang kehilangan perspektif sosial sehingga regulasi kurang sesuai dengan situasi sosial yang ada ditengah masyarakat. 2. Kurang responsive dan adaptif, RUU berpotensi tidak relevan dengan dinamika masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. 3. Risiko Judicial Review tinggi,		
--	--	---	--	--	--

		c. Database Lembaga d. Database Mitra e. Naskah Akademik f. Rancangan UU • Belum adanya fitur tentang hasil masukan maupun materi dari pakar di SIMAS PUU (PUUEKKUKES RA.DPR.GO.ID).	produk hukum rawan dibatalkan MK karena dianggap tidak partisipatif dan tidak legitimate. 4. Hilangnya kemitraan strategis, perancang memiliki kemungkinan untuk kehilangan peluang kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi sampai dengan stakeholder.		
2	Belum optimalnya pengelolaan Website SIMAS PUU (PUUEKKUKE SRA.DPR.GO.ID) dalam melakukan	1. Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKES RA.DPR.GO.ID) merupakan sebuah website tentang Partisipasi Masyarakat	Apabila hal ini tidak bisa diselesaikan maka hal ini akan berdampak bagi Perancang Undang-Undang (PUU): • Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi Proses Legislasi.	1. Peningkatan layanan Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dengan menjalankan tambahan informasi terkait hasil pelaksanaan dari Konsultasi Publik guna memberikan informasi	• Keterkaitan dengan Manajemen ASN: Penyelesaian isu ini merupakan wujud implementasi asas-asas manajemen ASN yang tertuang melalui Pasal 2 UU ASN. Dengan melakukan optimalisasi pengelolaan media sosial dalam penyebaran paparan dari pakar diharapkan PUU dapat meningkatkan

	publikasi berita dalam kegiatan Konsultasi Publik dalam proses Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik.	dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)) dimana partisipasi masyarakat berbasis <i>online system</i> guna mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan	• Hal ini dikarenakan lebih gampang terjadinya Misinformasi, karena yang ditampilkan hanya foto kegiatan Konsultasi Publik dengan Caption yang masih kurang jelas dalam mengungkapkan isu-isu apa saja yang diangkat. • Belum dapat terwujudnya <i>"Meaningful Public Participation"</i> Hal ini dikarenakan informasi yang tersaji dalam Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) belum menampilkan secara	yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. 2. menurunnya misinformasi yang terjadi di masyarakat, terutama kepada pengunjung Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). 3. Terwujudnya nilai keberhasilan dari <i>"Meaningful Public Participation"</i> dimana akan lebih banyak masukan dari masyarakat mengenai RUU dan meningkatkan semakin baik bagi kualitas RUU.	transparansi dan keterbukaan dalam melakukan fungsi sebagai Perancang Undang-Undang. Hal ini juga menunjukkan bahwa ASN bekerja secara professional dimana PUU dapat memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR RI dan Publik sebagai wujud akuntabilitas ASN. • Keterkaitan dengan SMART ASN: Keterkaitan isu ini dengan SMART ASN ialah melalui pelaksanaan optimalisasi penyebaran berita mengenai informasi dan topik isu yang diangkat dalam pelaksanaan Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). Hal ini menunjukkan penguasaan teknologi oleh ASN dalam melaksanakan tugasnya. Melalui hal ini, PUU dapat menambah atau memperkuat kredibilitas sebagai Perancang Undang-Undang.
--	--	--	--	--	---

		Undang-Undang di Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI. SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) memiliki beberapa fungsi dalam, menyampaikan informasi mengenai: • Menginformasikan kepada publik penyusunan	lengkap mengenai isi dari Konsultasi Publik, sehingga informasi yang dapat diakses oleh masyarakat di website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) masih terbatas. hal ini belum memenuhi pemenuhan penilaian untuk mewujudkan Partisipasi Publik yang Bermakna. Karena, informasi yang tersaji dalam pelaksanaan Konsultasi Publik belum tersampaikan isi beritanya kepada masyarakat. sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor belum		
--	--	---	---	--	--

		Naskah Akademik dan draf RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI. • Menerima masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan draf RUU yang sedang disusun Pusat Perancangan Undang-Undang	terpenuhinya masukan masyarakat yang bermakna, bukan sekedar formalitas. karena pada dasarnya masukan dari publik yang bermakna, membantu Perancang Undang-Undang (PUU) dalam memperbaiki kualitas RUU.		
--	--	---	--	--	--

		Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI. • Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas. 2. Publikasi mengenai kabar			
--	--	---	--	--	--

		terkini dari Keluarga Besar Pusat Perancangan UU Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI. 3. Format dari berita tersebut berisi tentang: • Foto dan Video dari Konsultasi Publik. • Info tentang Rancangan Undang-Undang (RUU). 4. Pada saat ini untuk			
--	--	--	--	--	--

		postingan Video ataupun Foto dari Konsultasi Publik hanya menampilkan foto kegiatan dan caption.			
3	Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)	• Pusat PUU EKKUINBANG-KESRA mempunyai tugas untuk menerima partisipasi dari masyarakat dalam selain dalam bentuk lisan, dan juga tulisan. untuk masukan, saran dan pertanyaan dapat dikirimka melalui Website: SIMAS PUU	• Perancang Undang-Undang tidak menerima atau menerima namun jumlahnya terlalu sedikit untuk pertanyaan di SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). • Tujuan dari pembuatan SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) sebagai pengolah masukan	• Meningkatnya partisipasi dari masyarakat melalui masukan dan pertanyaan di website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). • Terlaksananya tujuan dari pembuatan SIMAS terhadap PUU sebagai pengolah masukan dari masyarakat melalui Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dan	• Keterkaitan dengan Manajemen ASN: Sesuai dengan fungsi ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 UU ASN, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan harus menerapkan efektivitas dan efisiensi yaitu menyelenggarakan Manajemen ASN harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 UU ASN bahwa salah satu tujuan dalam pengelolaan kinerja adalah untuk peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus menerus.

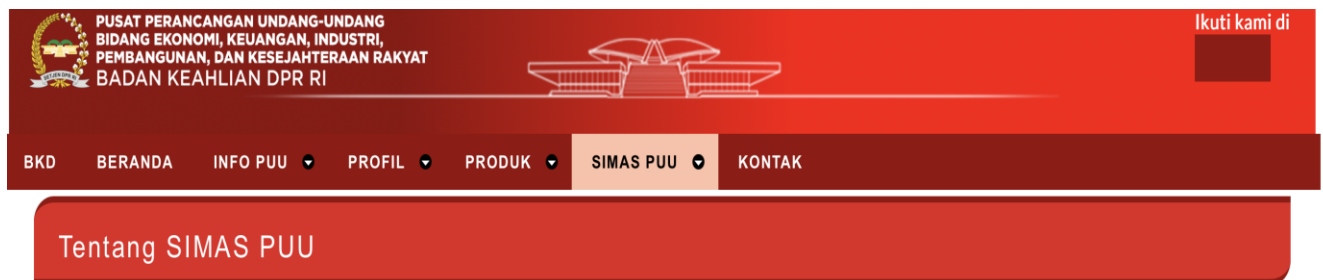
		(PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID). • Fokus utama kegiatan menerima partisipasi masyarakat saat ini, ditujukan pada pengisian kolom pertanyaan di SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID) EKRA. • Kenyataannya, PUU EKKUINBANG-KESRA menerima sedikit sekali pertanyaan di SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID). Hal ini masih	dari masyarakat melalui Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID) tidak tercapai. • Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID) terkesan menjadi kurang concern terhadap kurangnya minat masyarakat dalam memberikan masukan dan pertanyaan secara tertulis. • Hasil RUU dianggap kurang sesuai dengan keadaan masyarakat luas, dikarenakan belum tercapainya partisipasi publik yang bermakna.	menambah nilai kompeten dan akuntabilitas dari PUU. • PUU lebih concern terhadap peningkatan dan pengembangan dari website SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID). • Semakin meningkatnya kualitas RUU yang semakin baik dan sesuai dengan kondisi di masyarakat luas sehingga tercapai tujuan dari partisipasi publik yang bermakna.	• Keterkaitan dengan SMART ASN: Isu ini menunjukkan belum optimalnya penerapan pengembangan perbaikan teknologi yang ada di Pusat Perancangan Undang-Undang EKKUINBANGKESRA dimana pengembangan atas website simas dengan format pertanyaan yang lebih menarik masyarakat seharusnya bisa lebih diperhatikan dan menjadi objek pengembangan yang bisa menambah nilai dalam menarik partisipasi masyarakat luas dan menjadi bentuk dukungan keahlian PUU Kepada DPR RI dan Publik secara umum.
--	--	--	---	--	--

		menimbulkan pertanyaan tentang “kenapa partisipasi masyarakat dalam hal tertulis salah satunya di website SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID) masih sedikit bahkan hampir tidak ada sama sekali dalam periode waktu tertentu.			
--	--	--	--	--	--

Bukti Pembahasan Isu:

Isu 1

Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)



SIMAS PUU

Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan partisipasi masyarakat berbasis *online system* guna mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI. SIMAS PUU memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada publik penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI.
2. Menerima masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan draf RUU yang sedang disusun Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI.
3. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.

Videografis SIMAS PUU!

Terima kasih dan Selamat Berpartisipasi dalam SIMAS PUU!



Gambar 1. Belum adanya fitur penambahan hasil materi paparan dari pakar
(ISU 1)

Isu 2

Belum optimalnya pengelolaan Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dalam melakukan publikasi berita dalam kegiatan Konsultasi Publik dalam proses Rancangan Undang-Undang.



Beranda > Berita > Utama > Jauh dari Prinsip De...
UTAMA

Jauh dari Prinsip Demokrasi, Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Minim

Beberapa RUU yang disahkan di tahun ini menunjukkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak transparan dan cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan publik secara aktif.

Hanifah Dwi Jayanti

19 April 2025 · Bacaan 3 Menit

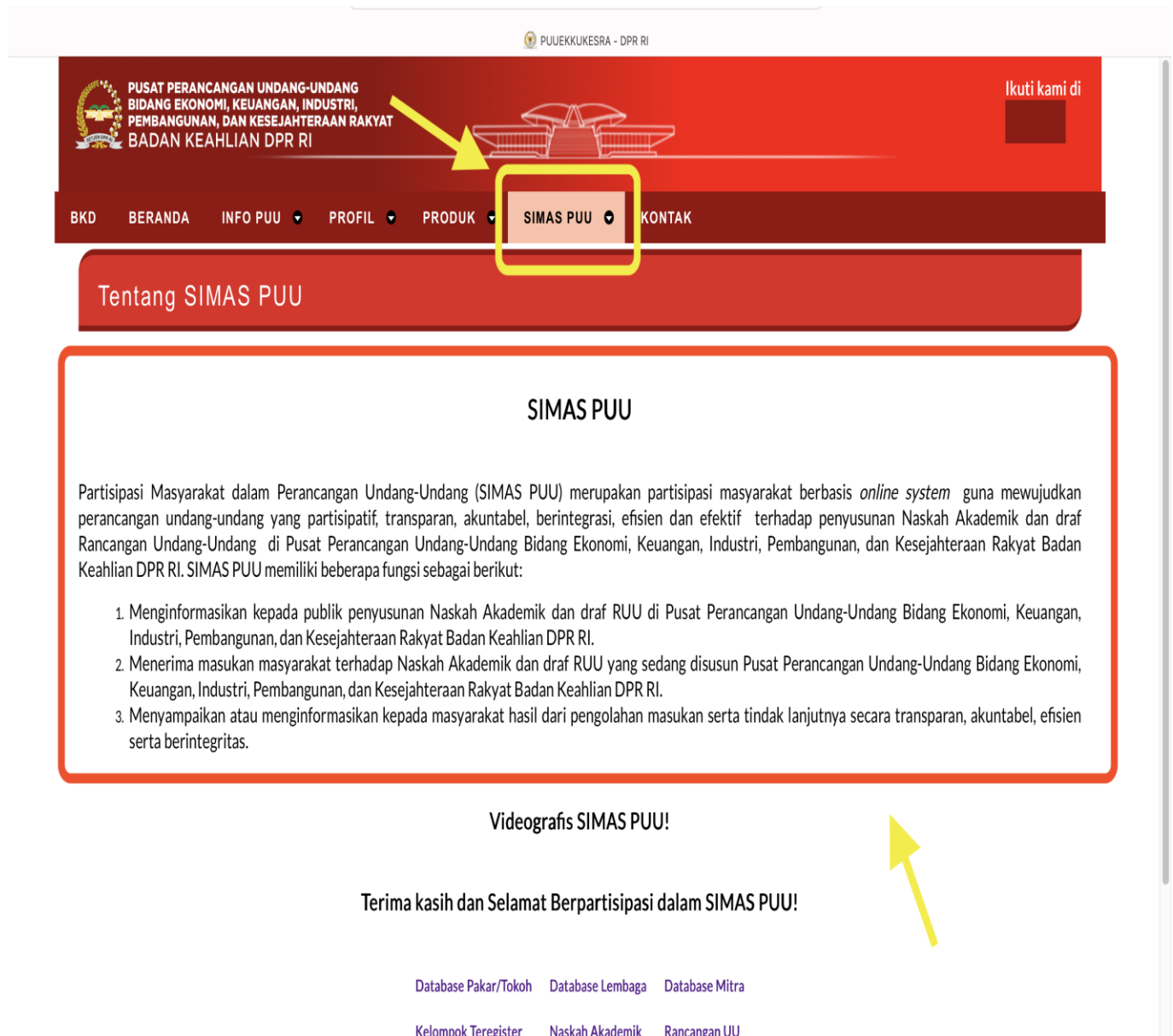


Situasi legislasi di Indonesia dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan di tahun ini menunjukkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak transparan dan cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan publik secara aktif.

Terbaru, survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahkan mencatat lebih dari 70 persen masyarakat tidak mengetahui bahwa DPR sedang membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, menilai situasi ini merupakan bagian dari kemunduran demokrasi yang semakin nyata. Berdasarkan berbagai indikator internasional seperti *Rule of Law Index* dan laporan *The Economist Intelligence Unit*, Arif menyebut bahwa Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam kualitas demokrasi selama 14 tahun terakhir.

Gambar 2. Artikel Berita yang mendukung penulis untuk mengambil Isu kedua sebagai Isu Utama.
(ISU 2)



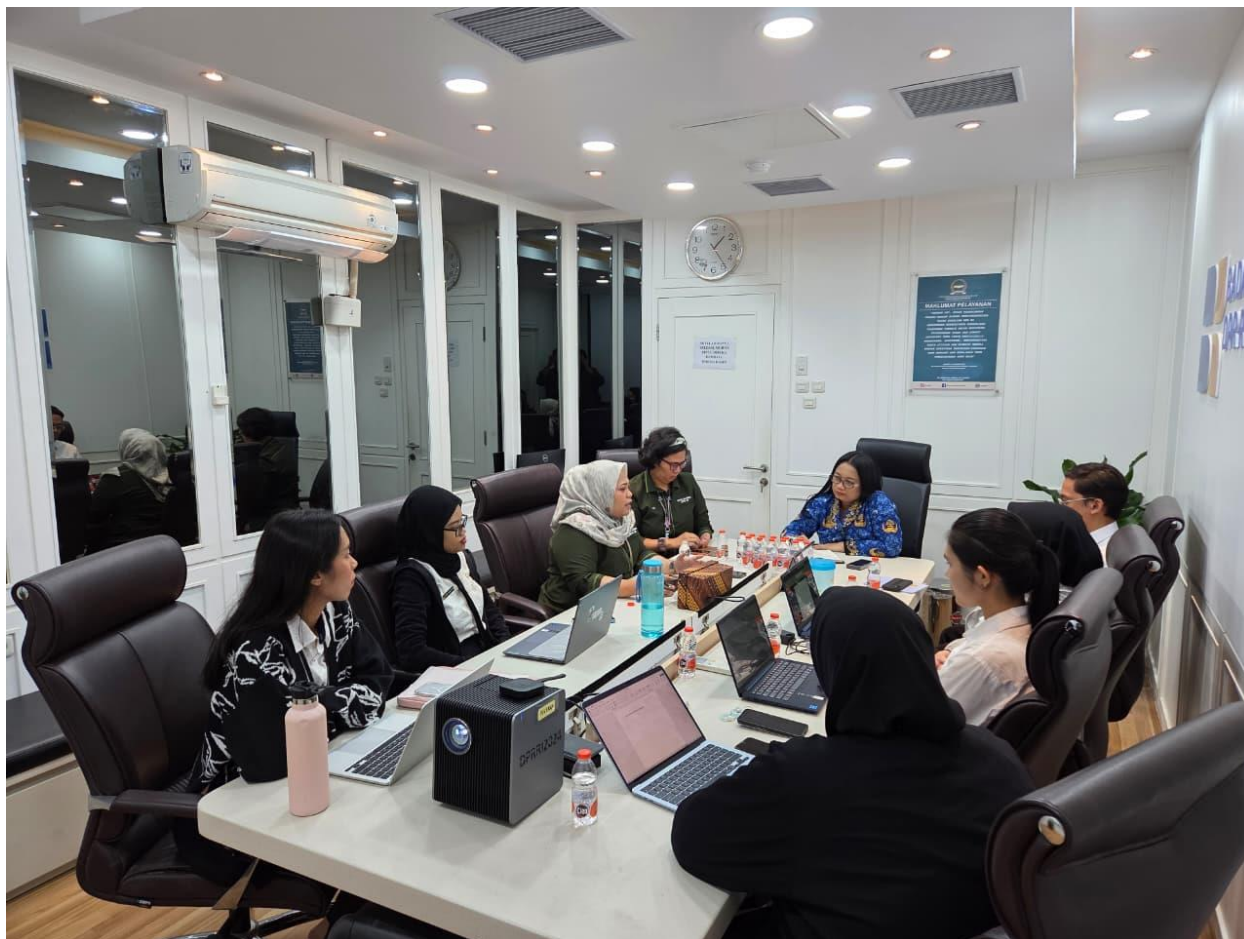
Gambar 3. Halaman Awal Bagian SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) , sebagai objek penelitian dari penulis untuk melakukan penelitian dalam optimalisasi publikasi berita di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)
(ISU 2)



Gambar 4.

Pertemuan dengan Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H selaku Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI. Bersama dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H selaku Pimpinan Tim Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dan CPNS 2025 dalam tema

“Pembahasan Tema Aktualisasi Berdasarkan Kebutuhan PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA dan Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi PUU”- 17.09.2025



Gambar 5.

Pertemuan dengan Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H selaku Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI. Bersama dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H selaku Pimpinan Tim Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dan CPNS 2025 dalam tema

“Pembahasan Tema Aktualisasi Berdasarkan Kebutuhan PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA dan Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi PUU” – 17.09.2025



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H (Ketua Tim Website PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA) - Selasa, 16 September 2025 (10.30 WIB)

- Hasil Pembahasan dari Pertemuan bersama Ibu KAPUS PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA dan Wawancara dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H (Ketua Tim Website PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA)

Penulis mendapatkan izin untuk menggunakan Isu ke 2 setelah membahas dan meminta persetujuan dari Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H selaku KAPUS PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA, Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H selaku Ketua Tim Website PUU dan Mba Meirina Fajarwati, S.H., M.H selaku Mentor Penulis. Pembahasan dari isu ke dua yaitu **“Belum optimalnya pengelolaan Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dalam melakukan publikasi berita dalam kegiatan Konsultasi Publik dalam proses Rancangan Undang-Undang”**, menjadi konsentrasi yang dipilih oleh penulis.

Penulis pertama kali mengajukan dikarenakan adanya keresahan dari beberapa artikel berita yang menyatakan bahwa **“Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi”**. Pada saat ini Pusat Perancangan Undang-Undang EKKUINBANGKESRA terus berupaya mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses Rancangan Undang-Undang. Dimana hal ini terus diupayakan untuk memperkuat nilai-nilai dari **“*Meaningful Public Participation*”** atau bisa juga disebut dengan **“Partisipasi Publik yang Bermakna”**.

Pusat PUU EKKUINBANGKESRA menjawab keresahan atas partisipasi publik ini dengan beberapa cara, yaitu:

1. **Aktif di Media Sosial Instagram @PUUEKRA.BKDPRRI , dimana terdapat info legislasi, foto-foto kegiatan dari Proses RUU.**
2. **Menjalankan Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .**

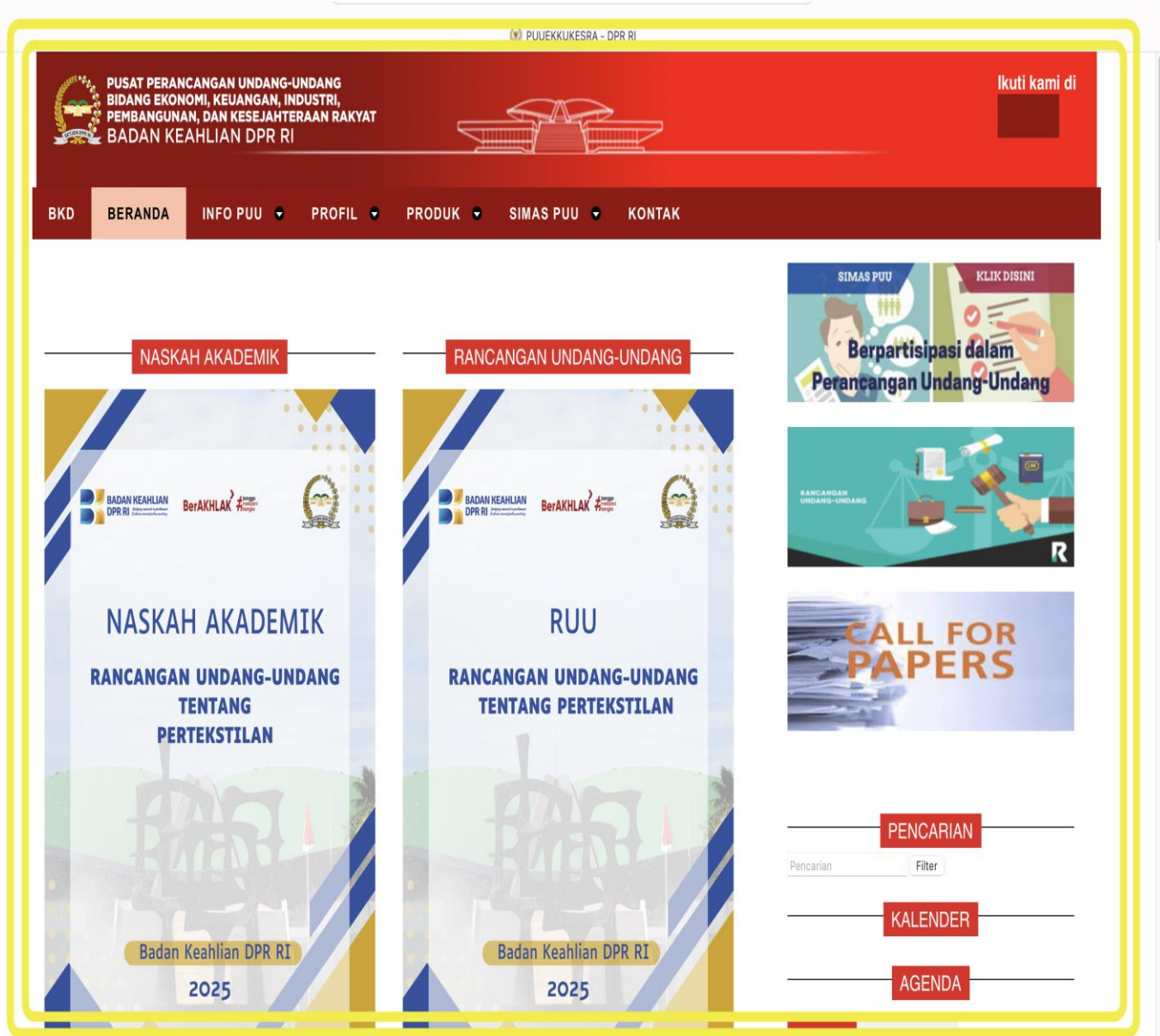
Namun sayangnya, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurut Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.H (Beliau biasa disebut dengan Ibu Dani) Selaku Ketua Tim Website PUU (Dalam Wawancara terbatas tanggal 16 September 2025). Ibu Dani menjelaskan bahwa beberapa program postingan di Instagram @PUUEKRA.BKDPRRI sebenarnya telah memuat beberapa kebutuhan yang ada untuk mempublikasi kabar terkini terkait proses apa saja yang sedang dilalui oleh PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA.

Namun masih terdapat permasalahan dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan info-info sejauh mana proses legislasi berjalan. Hal ini dikarenakan terkait dengan keterbatasan Tim Website yang berisi beberapa orang dan padatnya jadwal sebagai Perancang Undang-Undang. Sehingga , untuk saat ini informasi mengenai proses hasil diskusi dalam kegiatan Konsultasi Publik masih sangat terbatas.

Tampilan dari bukti adanya kegiatan tersebut hanyalah berupa foto, yang menurut Ibu Dani ada permintaan dari Bapak Kepala Badan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, meminta untuk adanya kolom berita tentang kegiatan apa saja yang berlangsung khususnya untuk Konsultasi Publik ada bukti berita yang jelas. Hal ini diminta karena, demi terpenuhinya nilai-nilai **Meaningful Public Participation**, diperlukan adanya informasi yang jelas tentang apa saja hasil dari pembahasan dalam Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholder dan masyarakat begitu pula dalam kanal Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) yang diharapkan ada kolom berita mengenai proses apa saja yang sedang berlangsung dalam sebuah RUU.

Kemudian dengan adanya kolom berita sebagai bentuk publikasi berita yang akuntabel dan transparan, diharapkan adanya peningkatan traffic kunjungan di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) , selain untuk meningkatkan traffic kunjungan, hal ini juga diharapkan bisa menambah minat partisipasi masyarakat di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) . Selain itu ini adalah bentuk tanggung jawab dari PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Hal ini disetujui oleh Ibu Wiwin selaku Kepala Pusat dari PUU EKKUINBANGKESRA, dimana dalam pertemuan ***“Pembahasan Tema Aktualisasi Berdasarkan Kebutuhan PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA dan Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi PUU” – 17 September 2025***, Ibu Wiwin menegaskan bahwa Komitmen penulis dalam pembuatan kolom Publikasi Berita di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) ini harus terus berlanjut seterusnya. Menurut Beliau, Program Keberlanjutan sangat penting karena itu merupakan salah satu upaya dari PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA dalam memberikan informasi yang bernilai akuntabel dan transparan dalam proses legislasi.



Gambar 7. Isu 2 Halaman Utama dari Website PUUEKKUKESRA DPR RI
(Belum terdapat kolom berita yang menunjukkan kegiatan dari PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA)

Isu 3

Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)

No. Telepon * :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?	
2.	Apakah ada saran mengenai ketentuan umum dalam RUU ini?	
3.	Apakah materi muatan dalam pasal dan bab-bab RUU sudah cukup mengatur permasalahan di masyarakat? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?	
4.	Apakah pengaturan sanksi baik administratif maupun pidana dalam RUU sudah cukup memadai? Apakah ada saran dan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakannya?	
5.	Selain hal-hal diatas apakah ada saran dan masukan guna penyempurnaan konsep awal RUU ini?	

Upload Dokumen no file selected

Tindak Lanjut

Nama	Pekerjaan	Aksi
------	-----------	------

Gambar 8. Hasil Tangkap Layar dari Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) terkait efektifitas daftar pertanyaan SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (ISU 3)

- **Penetapan Isu Prioritas**

B.1 Teknik Tapisan Isu

Dari 3 (tiga) isu yang telah diidentifikasi di unit kerja Pusat Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA, selanjutnya akan dipilih 1 (satu) isu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik tapisan isu *USG (Urgency, Seriousness, Growth)* sebagai kriteria dalam menentukan isu mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan analisis. *Urgency* menyatakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* menyatakan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. *Growth* menyatakan bahwaseberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Dalam menentukan tingkat *Urgency (U)*, *Seriousness (S)*, dan *Growth (G)* isu, maka akan dilakukan sistem skoring dengan skala nilai 1 – 5 sebagai berikut.

1. *Urgency*, skala pengukurannya adalah:

- 1 : Tidak mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 tahun
- 2 : Kurang mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
- 3 : Cukup mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
- 4 : Mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
- 5 : Sangat mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan

2. *Seriousness*, skala pengukurannya adalah:

- 1 : Tidak serius, dampak isu tidak berpengaruh pada individu dalam menyelesaikan pekerjaan, dampak hanya terbatas pada individu tidak menempuh cara yang lebih mudah
- 2 : Kurang serius, dampak isu berpengaruh pada kinerja individu
- 3 : Cukup serius, dampak isu berpengaruh pada kinerja beberapa individu
- 4 : Serius, dampak isu berpengaruh pada satu bagian dari unit kerja
- 5 : Sangat serius, dampak isu akan berpengaruh pada keseluruhan unit kerja

3. *Growth*, skala pengukurannya adalah:

- 1 : Tidak cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun
- 2 : Kurang cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
- 3 : Cukup cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
- 4 : Cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
- 5 : Sangat cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 1 bulan

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No.	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Prioritas
		U	S	G		
1	Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .	3	3	3	9	III
2	Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .	5	5	5	15	I
3	Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .	4	4	4	12	II

1. Urgency (U)

- a. Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (3) : Cukup Mendesak meskipun hal ini dapat diatasi dengan menambahkan fitur kolom untuk upload untuk solusi sementara.
- b. Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) . (5): Sangat serius. jika isu ini tidak diatasi, maka kurangnya keterbukaan atas partisipasi masyarakat akan menurunkan minat masyarakat dalam membaca perjalanan RUU yang sedang maupun akan dibuat. Hal ini menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait isu-isu yang diangkat dari hasil dalam Konsultasi Publik. Akan

berkurangnya penilaian atas pelayanan Pusat PUU dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.

- c. Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (4) : Serius. hal ini dikarenakan jika tidak diperbaiki mengenai format pertanyaan pada situs SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) , hal ini menjadikan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada fitur dari SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka.

2. Seriousness (S)

- a. Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (3): Cukup serius, dapat menurunkan pelayan PUU dalam sajian website. Dimana Masyarakat dapat menganggap kurang lengkapnya sajian website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) sebagai sebuah kekurangan yang berdampak pada masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi secara lengkap.
- b. Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) . (5): Sangat serius. Jika isu ini tidak teratasi maka masyarakat akan kehilangan ketertarikan atas informasi yang disampaikan dalam Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) , hal ini akan sangat disayangkan mengingat Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) salah satu media yang dapat memudahkan penyebaran informasi atas berjalannya suatu RUU baik dari detail proses sampai dengan info kegiatan yang berlangsung yang seharusnya dapat dengan mudah dinikmati aksesnya oleh masyarakat. Selain itu jika isu ini segera teratasi, ini adalah salah satu nilai positif yang menunjukkan bahwa Pusat PUU EKRA berkomitmen dengan sangat baik dalam memperbaiki dan memenuhi pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (4): Serius, dapat menjadi indicator seberapa jauh masyarakat akan berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi nya melalui tulisan di website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) , namun hal ini juga dapat menjadi indicator gagal tercapainya partisipasi publik jika yang menjadi penghambat salah satunya kurang mudahnya format pertanyaan yang disajikan.

3. Growth (G)

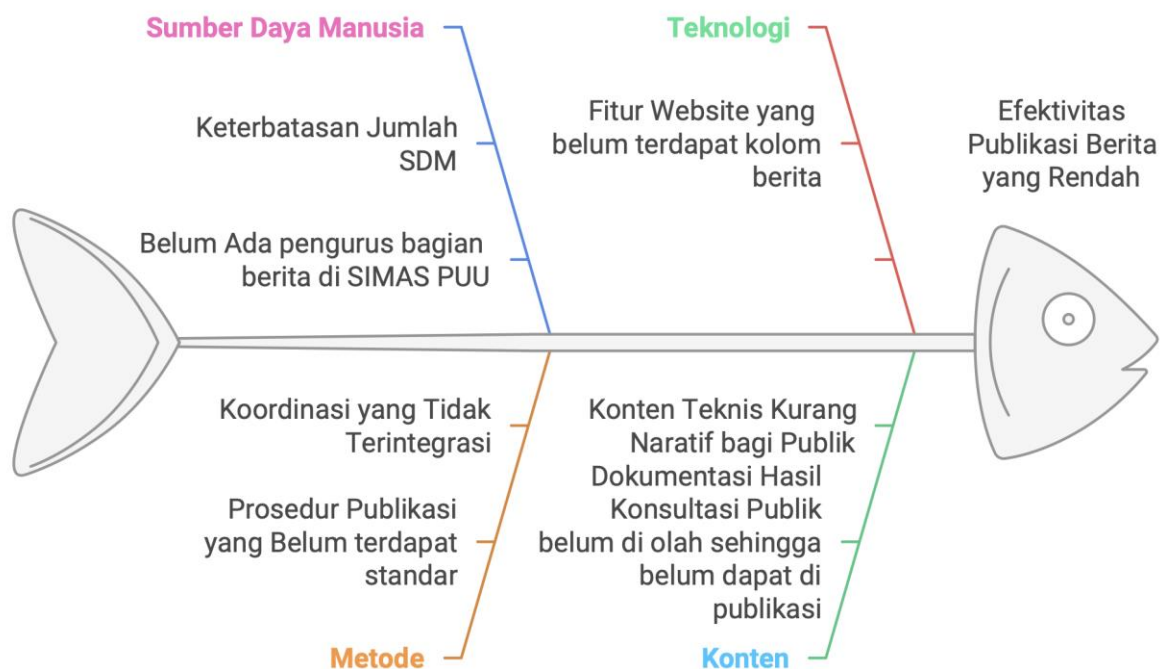
- a. Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (3): Tidak terlalu memburuk secara signifikan, karena masyarakat akan mencari cara lain di mesin pencarian online untuk mendapatkan sumber informasi terkait mengenai paparan dari para ahli dalam Konsultasi Publik dengan menggunakan kata kunci dari RUU yang sedang dibahas, walaupun hal tersebut menyulitkan.
- b. Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) . (5): Isu ini akan memburuk seiring berjalannya waktu karena hal ini akan menjadi suatu isu dimana kurang lengkapnya hasil postingan dari Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) , dimana jika dilengkapi dengan Highlight yang berisikan isu-isu yang diangkat dari stakeholder diharapkan akan menjadi pelengkap postingan yang berdampak baik bagi banyak orang termasuk berdampak baik bagi PUU EKRA sebagai bukti komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas.
- c. Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) (4): Masalah akan terus berkembang karena tidak terdapatnya partisipasi aktif dari masyarakat luas secara tertulis sehingga menghambat inovasi dan produktivitas.

Berdasarkan Analisis USG, isu **“Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .”** terpilih sebagai isu utama dengan total skor 15. Isu ini paling mendesak, memiliki dampak paling serius dan akan terus memburuk jika tidak segera diatasi.

- **Analisis Isu**

Akar penyebab dari isu **“Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) ”**, dapat dianalisis menggunakan Diagram Fishbone sebagai berikut:

Optimalisasi Publikasi Berita Konsultasi Publik di SIMAS PUU



Gambar 9. Teknik Fishbone membedah “Optimalisasi Publikasi Berita Konsultasi Publik di SIMAS PUU
(PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)”

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Tim Website yang ada di Perancang Undang-Undang (PUU).
2. Belum terdapat pengurus khusus yang membuat segmen “Berita” di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .

b. Metode

1. Belum terdapat prosedur publikasi berita yang baku (SOP Belum Detail).
2. Belum terdapat alur koordinasi yang terintegrasi antara penyusun berita dan Tim Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) .

c. Teknologi

Belum terdapat fitur kolom khusus pada halaman awal website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) yang menampilkan kolom berita mengenai informasi dan highlight isu dari Konsultasi Publik yang berlangsung.

d. Konten

1. Informasi yang ada pada media sosial PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA terkait Konsultasi Publik kurang naratif bagi publik.
2. Data hasil Konsultasi Publik belum diolah sehingga belum dapat dibagikan kepada masyarakat.

• **Rekomendasi Penyelesaian Isu**

Untuk menyelesaikan isu **“Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) ”** penulis mengusulkan untuk membuat kolom publikasi berita yang berisi tentang Konsultasi Publik beserta dengan template dari berita Konsultasi Publik yang berisikan Isu-Isu hasil Konsultasi Publik, dan Template dari berita yang memiliki ciri khas dari PUU EKRA. Dengan adanya publikasi berita mengenai Konsultasi Publik ini diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk mengakses kabar terkini dari PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA hasil pembahasan Konsultasi Publik pematik dari pakar/stakeholder.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA
Identifikasi Isu	: 1. Belum tersedia fitur informasi mengenai hasil masukan pakar / stakeholder untuk diketahui masyarakat di website: SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID.DPR.GO.ID). 2. Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). 3. Kurang efektifnya mekanisme susunan pertanyaan dalam Website: SIMAS PUU. (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).
Isu Yang Diangkat	: Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).
Gagasan Pemecahan Isu	: Pembuatan Kolom Berita yang Berisi Highlight dari Konsultasi Publik Pada Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	Persiapan kegiatan analisis dan evaluasi isi dari Website: SIMAS PUU (PUUEKKUKES RA.DPR.GO.ID). (Mengidentifikasi hal-hal yang masih kurang dalam publikasi berita PUU).	1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi dan pengumpulan informasi data yang diperlukan untuk pembuatan berita di Website SIMAS Perancang Undang-Undang (PUU)	Laporan hasil riset.	Kompeten: Mengumpulkan informasi data selengkap mungkin merupakan salah satu upaya melaksanakan pekerjaan untuk memberikan kualitas terbaik merupakan implementasi ASN yang berkompeten.	Manajemen ASN: Pada tahap perencanaan, membiasakan diri melakukan riset terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja ASN. SMART ASN: Mengimplementasikan digital skill dengan melakukan penelusuran data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber media.	Kegiatan pertama berupa persiapan dengan mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan salah satu misi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu <i>“Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.</i> Adapun dalam lingkup unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan visi Pusat Perancangan Undang-Undang
--	---	---	-----------------------------	--	---	---

		2. Konsultasi dengan Mentor	Dokumentasi dan Notulensi Konsultasi.	Kolaboratif: Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru sehingga memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan, Harmonisasi: Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.	Manajemen ASN: Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. SMART ASN: Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global	EKKUINBANGKESRA, yaitu <i>"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas."</i> Dan salah satu misinya, yaitu <i>"Misi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan</i>
--	--	-----------------------------	---------------------------------------	--	--	---

					sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran luas yang solutif.	<i>Kesejahteraan Rakyat, yaitu:</i> • <i>Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan</i> • <i>Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.</i>
--	--	--	--	--	---	---

	Penyusunan Template Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) untuk kegiatan Konsultasi Publik	1. Menyusun konsep dari Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	Draft Template Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) yang berisikan tulisan dan foto kegiatan	Kompeten: Menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar draft yang terbentuk dapat tersusun secara baik dan terstruktur.	Manajemen ASN: Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Penyusunan konsep Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. SMART ASN: Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk memahami konsep Website SIMAS	Adapun dalam lingkup unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan visi Pusat Perancangan Undang-Undang EKKUINBANGKESRA, yaitu <i>"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan</i>

					PUU (PUUEKKUKESRA. DPR.GO.ID) dan memahami data yang ada untuk dijadikan dasar Menyusun konsep Berita SIMAS PUU (PUURKKUKESRA) .	<i>Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.”</i> Dan salah satu misinya, yaitu <i>“Misi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan</i>
--	--	--	--	--	--	---

		2. Konsultasi dengan Mentor	Dokumentasi dan notulensi konsultasi	Kolaboratif: Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan, Harmonis: Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.	Manajemen ASN: Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. SMART ASN: Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global	Kesejahteraan Rakyat, yaitu: • Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan • Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.
--	--	-----------------------------	--------------------------------------	---	--	--

					sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif.	
	Menyusun SOP sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	1. Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	Draft SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	Kompeten: Menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar Alur Pelaksanaan Berita	Manajemen ASN: Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Pembuatan SOP Alur Berita SIMAS PUU	Adapun dalam lingkup unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan visi Pusat Perancangan Undang-Undang EKKUINBANGKESRA, yaitu

				SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik.	(PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. SMART ASN: Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk membentuk Alur SOP dalam Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	<i>"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas."</i> Dan salah satu misinya, yaitu <i>"Misi Pusat Perancangan</i>
--	--	--	--	--	--	--

		2. Menentukan Draft Artikel Berita untuk disesuaikan dengan template yang telah dibuat sebelumnya.	Dokumen draft artikel berita untuk SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DP R.GO.ID).	Akuntabel: Penentuan bentuk dari Artikel berita yang akan dipublikasi di SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DP R.GO.ID) merupakan wujud sikap akuntabel, dimana dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi dalam mengambil Keputusan.	Manajemen ASN: Sesuai dengan asas profesionalitas, pemilihan untuk Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) didasarkan oleh adanya urgensi kebutuhan untuk mendirikan nilai akuntabel dan transparansi informasi kepada masyarakat yang menjadika hal ini patut untuk dikaji. SMART ASN: Adanya pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan sajian informasi kepada masyarakat sehingga bukti	Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu: • Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan • Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.
--	--	--	---	---	---	---

					bentuk tanggungjawab dalam transparansi proses legislasi mendorong terciptanya budaya integritas untuk bertanggungjawab atas Tindakan atau Keputusan.	
--	--	--	--	--	--	--

		3. Membuat analisis dan evaluasi dari draft Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA .DPR.GO.ID).	Dokumen hasil analisis dan evaluasi	Adaptif: Mencerminkan perilaku yang adaptif, penulis secara proaktif membuat prototype dimana hasil analisis dan evaluasi dari Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DP R.GO.ID) (Hasil analisis dari Konsultasi Publik yang telah berlangsung dijadikan sebagai studi kasus untuk pembuatan berita SIMAS PUU(PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID)), merupakan bentuk inovasi produk yang diharapkan menjadi outcome dari SIMAS PUU(PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID) kedepannya.	Manajemen ASN: Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya. SMART ASN: Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk Menyusun analisis dan evaluasi hasil dari Artkel Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA. DPR.GO.ID).	
--	--	---	-------------------------------------	--	--	--

Melaksanakan Finalisasi Publikasi percobaan berita hasil Konsultasi Publik	1. Konsultasi dengan Mentor.	Dokumentasi dan Notulensi Konsultasi	Kolaboratif: Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan, Harmonis: Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.	Manajemen ASN: Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. SMART ASN: Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global	Adapun dalam lingkup unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan visi Pusat Perancangan Undang-Undang EKKUINBANGKESRA, yaitu <i>"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas."</i> Dan salah satu misinya, yaitu <i>"Misi</i>
--	------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

					sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif.	<i>Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:</i> • <i>Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan</i>
--	--	--	--	--	--	---

		2. Minimal 1 berita hasil Konsultasi Publik dipublikasikan di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESR A.DPR.GO.ID) dengan Format yang terstruktur baku dan sesuai dengan template yang telah dibuat sebelumnya.	Dokumen Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DP R.GO.ID) yang telah jadi mengikuti template yang telah dibuat	Adaptif: Mencerminkan perilaku yang adaptif, penulis secara proaktif membuat Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DP R.GO.ID) untuk dilakukan publikasi sesuai ketentuan alur SOP yang telah dibuat.	Manajemen ASN: Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya. SMART ASN: Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk Menyusun analisis dan evaluasi hasil dari Artikel Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA. DPR.GO.ID).	Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan • Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.
--	--	---	--	--	---	--

	Sosialisasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKES RA.DPR.GO.ID) di PUU EKKUINBANGKESRA	1. Menyiapkan bahan pemaparan sosialisasi 2. Menyerahkan dan/atau menyampaikan hasil pembuatan	Dokumen digital untuk bahan paparan sosialisasi Dokumentasi	Kompeten: Menunjukkan perilaku ASN yang kompeten dalam melaksanakan tugas kualitas terbaik. Berorientasi Pelayanan:	Manajemen ASN: Menyiapkan bahan paparan untuk sosialisasi melalui digital merupakan bentuk pembiasaan diri melakukan persiapan yang baik sebelum pelaksanaan kegiatan dapat mendorong terciptanya hasil kerja ASN yang lebih baik. SMART ASN: Mengimplementasikan digital skill dengan melakukan input hasil kerja berupa prototype Artikel Berita di Website SIMAS PUU	Adapun dalam lingkup unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan visi Pusat Perancangan Undang-Undang EKKUINBANGKESRA, yaitu <i>"Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas."</i>

		Artikel Berita SIMAS PUU		Sosialisasi penyampaian hasil pembuatan kolom berita beserta artikel berita pada Website SIMAS PUU, mencerminkan ASN yang berorientasi pelayanan agar Perancang Undang-Undang (PUU EKKUKESRA) lainnya juga mendapatkan pemahaman yang sama. Adaptif: Nilai adaptif mencerminkan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, inovasi perubahan yang ada perlu diimbangi dengan kemampuan diri untuk menyesuaikan diri dan berkembang.	(PUUEKKUKESRA. DPR.GO.ID). Manajemen ASN: Sesuai dengan asas akuntabilitas dalam Pasal 2 UU ASN, maka hasil kerja yang dilakukan perlu untuk disosialisasikan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan keterbukaan kepada Para Perancang Undang-Undang yang berada di EKKUINBANGKES RA. SMART ASN: Seorang SMART ASN salah satunya ditunjukkan dengan	Dan salah satu misinya, yaitu <i>“Misi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:</i> • <i>Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan</i>
--	--	-----------------------------	--	---	--	---

		3. Menyusun Laporan	Laporan Kegiatan	Harmonis dan Kolaboratif: Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud perilaku yang harmonis dan kolaboratif dengan melibatkan para Perancang Undang-Undang untuk menyamakan pandangan juga membangun lingkungan kerja yang suportif. Akuntabel: Penyusunan laporan kegiatan merupakan wujud sikap dari nilai akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan.	jiwa kewirausahaan yang diantaranya dengan ditandai sikap keberanian dan kreativitas. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga menunjukkan adanya <i>hospitality</i> agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.	• Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.
--	--	---------------------	------------------	---	---	--

					Manajemen ASN: Sesuai dengan asas akuntabilitas, bahwa setiap hasil kerja dan perilaku kerja ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public. SMART ASN: Salah satu cerminan SMART ASN adalah mempunyai sikap profesionalisme dengan menyelesaikan tugas sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.	
--	--	--	--	--	---	--

Tabel 4. Matrik Rancangan Aktualisasi

B. Stakeholder

Pelaksanaan aktualisasi ini memerlukan adanya Kerjasama dan koordinasi untuk mendukung penyelesaian aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *stakeholder* yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Koordinator Bidang Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA; dan
3. Analis Perancang Undang-Undang EKKUINBANGKESRA.

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini diharapkan tidak terjadi hambatan yang berarti. Namun penulis perlu melakukan identifikasi kendala yang dapat terjadi dan strategi dalam menghadapi kendala tersebut guna menjadi strategi preventif dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Berikut adalah table kendala dan strategi dalam menghadapi kendala yang akan dihadapi oleh penulis:

Kendala	Strategi
Adanya perbedaan standar dan selera dalam hasil akhir dari Artikel Publikasi Berita di SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).	Masukan dapat diakomodasi dalam perbaikan-perbaikan kedepannya tanpa menghilangkan karakteristik dari penulis dan menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Tim Website.
Adanya perbedaan jadwal terbit yang dimintakan untuk publikasi dari Tim Website dengan PUU	Perbedaan ini dapat diakomodir dengan mencari jalan Tengah, agar kegiatan aktualisasi tidak mendapat hambatan dan ketentuan jadwal tayang dari Tim Website bisa terakomodir dengan baik.

Tabel 5. Kendala dan Strategi

D. Analisis Dampak

Pada pelaksanaan rancangan aktualisasi ini dengan isu “ Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)”, memberikan dampak sebagai berikut:

1. Tersedianya Kanal Berita Terbaru dari setiap kegiatan Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU(PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID)..
2. Mendukung peningkatan hasil kerja dari Perancang Undang-Undang (PUU) dalam menyajikan informasi yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat.
3. Dalam jangka Panjang, kegiatan Publikasi Berita pada Website SIMAS PUU(PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). menjadi salah satu penyedia informasi terkini mengenai proses legislasi pada Konsultasi Publik yang terbuka dan akuntabel guna menghindari misinformasi kepada masyarakat.
4. Dengan memberikan informasi yang terbuka dan akuntabel, diharapkan dalam jangka Panjang dapat menaikkan minat masyarakat dalam berpartisipasi di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dan dapat mencapai nilai yang diharapkan dalam Partisipasi Publik Yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*).
5. Meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menaikkan partisipasi publik yang bermakna (*Meaningful Public Participation*).

E. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
		I	I	II	I	I	I	II	I	I	I	II	I
		I	I	I	V	I	I	I	V	I	I	I	V
1.	Persiapan kegiatan analisis dari Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).												
	a) Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi												
	b) Konsultasi dengan Mentor												
2	Penyusunan template Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID). untuk kegiatan Konsultasi Publik												
	a) Membuat Draft Template Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.I D) yang berisikan Tulisan dan Foto kegiatan Konsultasi Publik												
	b) Konsultasi dengan Mentor												
	c) Perbaiki Draft Template Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.I D) yang berisikan Tulisan dan Foto kegiatan Konsultasi Publik.												

3	Menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).											
	a) Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).											
	b) Konsultasi Draft Artikel Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) yang telah disesuaikan dengan template Berita yang telah dibuat sebelumnya.											
	c) Konsultasi dengan Mentor untuk membuat Analisis dan Evaluasi dari Draft Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).											
	d) Perbaikan Draft Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID).											
4	Finalisasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) Percobaan pertama Publikasi berita hasil Konsultasi Publik											
	a) Konsultasi dengan Mentor											
	b) Konsultasi dengan Tim Website											

	c) Minimal Publikasi 1 Berita hasil Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) dengan Format Terstruktur Baku dan sesuai dengan Template yang telah dibuat sebelumnya.											
5	Sosialisasi Berita SIMAS PUU (PUUEKKUKESRA.DPR.GO.ID) di PUSAT PUU EKKUINBANGKESRA											
	a) Menyiapkan bahan pemaparan sosial (Vers. Digital)											
	b) Sosialisasi											
	c) Menyusun Laporan											

Tabel 6. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan

BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Persiapan kegiatan analisis dari Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).												
	a) Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi												
	b) Konsultasi dengan Mentor												
2	Penyusunan template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk kegiatan Konsultasi Publik												
	a) Membuat Draft Template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang berisikan Tulisan dan Foto kegiatan Konsultasi Publik												
	b) Konsultasi dengan Mentor												
	c) Perbaiki Draft Template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang berisikan Tulisan dan Foto kegiatan Konsultasi Publik.												

3	Menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).												
	a) Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).												
	b) Konsultasi Draft Artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang telah disesuaikan dengan template Berita yang telah dibuat sebelumnya.												
	c) Konsultasi dengan Mentor untuk membuat Analisis dan Evaluasi dari Draft Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).												
	d) Perbaikan Draft Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).												
4	Finalisasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) Percobaan pertama Publikasi berita hasil Konsultasi Publik												
	a) Konsultasi dengan Mentor												
	b) Konsultasi dengan Tim Website												
	c) Minimal Publikasi 1 Berita hasil Konsultasi Publik di												

	Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dengan Format Terstruktur Baku dan sesuai dengan Template yang telah dibuat sebelumnya.												
5	Sosialisasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) di PUU EKKUINBANGKESRA												
	a) Menyiapkan bahan pemaparan sosial (Vers. Digital)												
	b) Sosialisasi												
	c) Menyusun Laporan												

Tabel 7. Matrik Jadwal Kegiatan

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini seperti yang ada pada jadwal pelaksanaan kegiatan, yaitu terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yang didalamnya meliputi tahapan-tahapan kegiatan, Berikut merupakan penjelasan kegiatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan aktualisasi:

B.1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi

1. Deskripsi kegiatan

Kegiatan ini merupakan tahapan awal untuk memulai pelaksanaan aktualisasi dalam pembuatan Kolom Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Berikut ini rincian tahapan yang ada pada kegiatan pertama:

a. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi

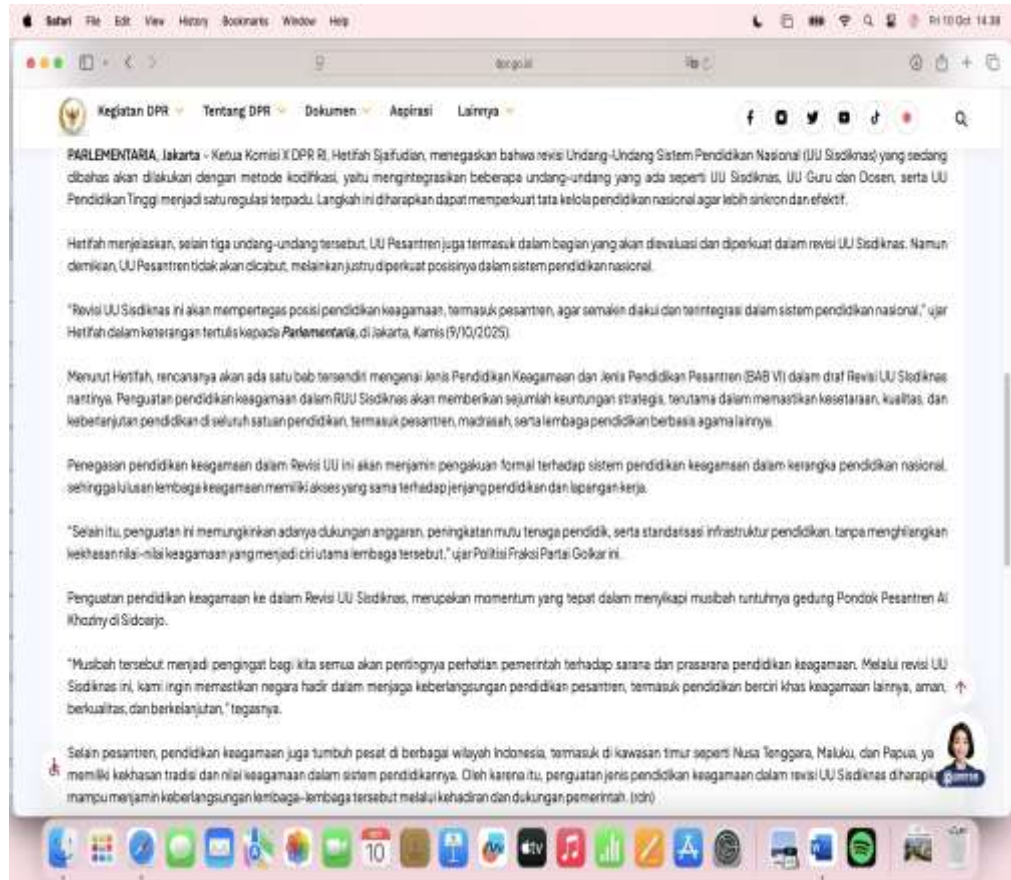
Kegiatan ini merupakan tahapan awal untuk membuat Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id), hal ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan mengenai cara membuat berita yang baik dan menarik. Serta memperdalam pengetahuan terkait dengan indikator dari

sebuah berita yang baik. Adapun studi literatur dilakukan dengan membaca berbagai sumber, diantaranya Berita Resmi di Website DPR (<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita>), artikel jurnal, dan bahan refrensi elektronik lainnya. Dari hasil studi literatur ini, didapatkan pemahaman mengenai:

- (1) Pola pembuatan berita / template berita yang ada di Website Resmi DPR RI.
- (2) Konsep dari Berita yang Baik.
- (3) Indikator dari Berita yang Baik.
- (4) Metode penyusunan dari Berita yang akan dimuat di dalam Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).



Gambar10 . Dokumentasi pengumpulan data informasi.



Gambar 11 . Dokumentasi pengumpulan data informasi.

b. Konsultasi dengan Mentor

Setelah melakukan indentifikasi serta pengumpulan data informasi, Penulis selanjutnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor mengenai persiapan untuk membuat Berita di . Tahapan ini dilakukan ini dilakukan untuk dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan konsep atas bahan yang telah Penulis dapatkan untuk membuat Berita di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dengan arahan mentor. Dari hasil konsultasi pada tahapan kegiatan ini, diantaranya menghasilkan diskusi mengenai:

- (1) Penjelasan mengenai kegiatan yang akan anak didik lalui, kemudian masukan-masukan dalam melihat tantangan serta mempermudah pengerjaan agar berita yang dihasilkan efektif dan menarik.
- (2) Penilaian atas indikator berita yang baik.

- (3) Mengidentifikasi halaman awal dari Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk melihat dan mengukur bagian kolom Berita.



Gambar 12 . Dokumentasi Kegiatan Konsultasi dengan Mentor (Minggu 1)

(2) Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

a. Kompeten

Berdasarkan penjelasan di atas, tahapan pertama dalam kegiatan ini menunjukkan bentuk implementasi dari nilai-nilai BerAKHLAK, terutama nilai kompeten. Nilai kompeten ditunjukkan melalui upaya Penulis dalam mengumpulkan informasi data selengkap mungkin, merupakan salah satu upaya melaksanakan pekerjaan untuk memberikan kualitas terbaik merupakan implementasi ASN yang berkompeten.

b. Kolaboratif

Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru sehingga memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan.

c. Harmonisasi

Adanya interaksi komunikasi melalui tahapan kegiatan diskusi juga tentu turut membangun hubungan yang baik antara Penulis dan Mentor. Adanya ekosistem lingkungan kerja yang harmonis akan menunjang kinerja yang lebih baik dalam organisasi. Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.

(3) Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Kegiatan pertama ini dapat disebut sebagai proses perencanaan. Membiasakan diri melakukan riset terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja ASN. Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan.

Mengimplementasikan digital skill dengan melakukan penelusuran data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber media. Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran luas yang solutif.

(4) Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan mengumpulkan bahan penyusunan berita melalui studi literatur serta konsultasi mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi Pusat Perancangan Undang-Undang Ekuinbangkesra, yaitu “Menjadikan Pusat Perancangan Undnag-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.”

B.2. Penyusunan Template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk kegiatan Konsultasi Publik

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan kedua ini dapat dikatakan sebagai poin inti dari aktualisasi yang dilakukan. Hal itu karena mengingat bahwa kegiatan kedua ini merupakan tahapan proses dari Penyusunan Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Berikut ini rincian tahapan yang ada pada kegiatan kedua:

a. Menyusun konsep dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).

Pada Tahapan ini, Penulis memulai untuk Menyusun Konsep dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) sebagai Produk untuk template dasar dalam menyusun berita. Pada tahapan ini, dihasilkan template atas berita yang terdiri atas:

- 1) Judul dan Tanggal Berita dibuat.
- 2) Pihak Pelaksana Kegiatan dan Tempat dilaksanakannya Kegiatan.
- 3) Tujuan dilaksanakan kegiatan.
- 4) Narasumber utama.
- 5) Pembahasan utama atas kegiatan.
- 6) Pembahasan tambahan atas kegiatan + Narasumber pendukung.
- 7) Penutup.
- 8) Nama Penulis

b. Konsultasi dengan Mentor

Setelah terbentuk template dari Berita untuk SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id), selanjutnya Penulis menyerahkan hasil draft tersebut kepada mentor untuk mendapatkan perbaikan. Dari hasil konsultasi ini, didapatkan beberapa masukan perbaikan dan tambahan saran berupa:

- 1) Melakukan pembuatan template berita dimana adanya formula susunan berita yang terstruktur dan rapi. Hal ini berguna untuk memudahkan anak didik untuk membuat berita kedepannya.

Bukti:

Sumber Berita

<https://www.youtube.com/live/BxedwoabUTo?si=BcJkIsRVK8r3qJm7>

**Perubahan RUU Sisdiknas dalam Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional,
Kesejahteraan Guru dan Dosen**

Ditulis pada 30 September 2025

(1)

Ikatan Sarjana Penan Indonesia (ISPI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (27/9/2025), menggelar Seminar Nasional dengan tema "Kajian Kritis Draf Rancangan Revisi (UU Sisdiknas):"

Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ruang Seminar Pascasarjana dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Kemendiknas, dan Kemendikdasmen. (2)

Komisi X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk Menyusun Draf Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), selaku narasumber perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa "Perlunya perubahan RUU Sisdiknas ini dengan metode kodifikasi yang menggabungkan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi untuk membuat undang-undang dalam satu sistem pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, dan menghindari disharmoni peraturan perundang-undangan". (3)

Dr. Wiwin menegaskan, permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, diantaranya meliputi: ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan; kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan optimal; serta perlunya perluasan cakupan wajib belajar.

"UU Sisdiknas telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini menjadikan perlunya ada perbaikan atas Undang-Undang ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk hal yang telah baik dan masih relevan tetap dipertahankan. Misal untuk pengaturan mengenai kesejahteraan guru dan dosen yang perlu diperkuat dalam RUU Sisdiknas ini, salah satunya melalui penegasan atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen" Ujar Dr. Wiwin.

Dr. Wiwin menjelaskan mengenai perluasan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun untuk pendidikan dasar kini menjadi 13 tahun yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dr. Wiwin juga menambahkan tentang penegasan pengaturan Pendidikan Keagamaan dan pendidikan pesantren, yang menjadi "Subject to Discuss" dalam pelaksanaan *Meaningful Public Participation* karena pendidikan pesantren telah diatur tersendiri (4)

Gambar 13. Contoh Tempalte Berita (1)

dalam Undang-Undang tentang Pesantren. Perlu memisahkan antara pengaturan terkait bidang pendidikan yang akan dilakukan kodifikasi dalam RUU Sisdiknas dan pengaturan terkait bidang pendidikan lainnya yang tidak turut dilakukan kodifikasi agar tidak saling tumpang tindih.

"Ketika berbicara tentang pendidikan diperlukan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini agar semua sektor dapat mengakses data-data pendidikan dengan baik dan benar", Ujar Dr. Wiwin.

(5)

Selain Dr. Wiwin juga hadir Dr. Muhammad Yusra, S.Pd.,M.T dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas tentang perlunya RUU Sisdiknas dalam mengakomodir tentang teknologi dan isu pendidikan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dari Kemendikdasmen terdiri atas: Wajib belajar 13 tahun; Pelaksanaan pembelajaran; Anggaran pendidikan; Kewenangan pengelolaan anggaran; Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan pendidikan; Restrukturisasi pengelolaan guru; dan Tunjangan profesi guru.

Dr. Yusra membahas tentang urgensi perubahan dalam RUU Sisdiknas diperlukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu: Tantangan dalam menjawab relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan industri; irelevan dengan dinamika dan disrupsi sosial; jaminan perlindungan serta intimidasi terhadap guru; kompetensi pendidikan yang tidak merata; dan tumpang tindihnya penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Sementara itu, mewakili ISPI, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd, selaku Ketua Dewan Pembina ISPI memberikan masukan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban perlu diatur secara jelas dalam RUU Sisdiknas. Hal ini terkait tentang hak kepemilikan dari sekolah itu sebenarnya milik siapa; kemudian siapa yang menyediakan sumber daya manusia, sarana dan biaya; siapa yang mengontrol mutu dari sekolah yang telah ada.

"Mudah-mudahan tantangan pendidikan yang semakin berat ke depan, bisa dijawab dengan pendidikan yang semakin berkualitas, dan hal ini perlu dilandasi dengan regulasi yang betul-betul memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia kedepannya," Pungkasnya.

(6)

Selain itu salah satu narasumber lain Dr. Ismail Hasan, S.H. MH perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengingatkan agar norma-norma yang dirumuskan di DPR bersinergi dengan Kementerian-kementerian selaku pemangku kepentingan. Beliau juga menegaskan bahwa RUU ini perlu memperkuat argumentasi filosofis yang menjadi dasar yang kuat bahwa Pendidikan Adalah tugas konstitusional bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar serta ditukar dengan berbagai kepentingan lainnya.

(7)

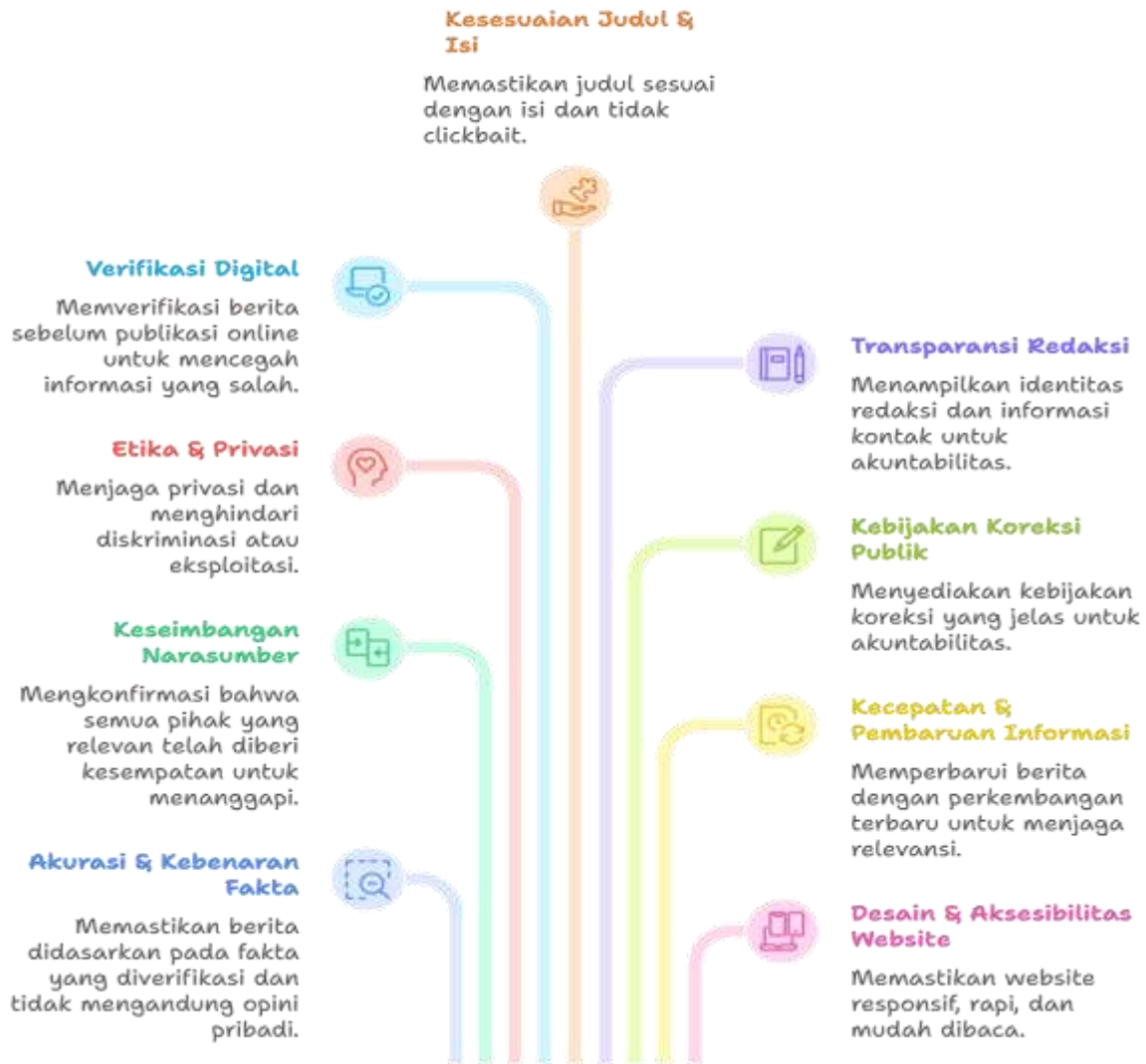
Penulis: Adelia. D

(8)

Gambar 14. Contoh Template Berita (2)

- 2) Mengidentifikasi Template Berita untuk dimuat di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). untuk melihat keakuratan sebuah berita, berdasarkan contoh template di atas:
(Pada gambar diatas terdapat nomor-nomor pada berita yang telah di kotak-kotakkan berdasarkan jenis dan bagian dari berita tersebut)
 - (1) Judul dan Tanggal Berita dibuat.
 - (2) Pihak Pelaksana Kegiatan dan Tempat dilaksanakannya Kegiatan.
 - (3) Tujuan dilaksanakan kegiatan.
 - (4) Narasumber utama
 - (5) Pembahasan utama atas kegiatan.
 - (6) Pembahasan tambahan atas kegiatan + Narasumber pendukung.
 - (7) Penutup.
 - (8) Nama Penulis.
- 3) Mentor memberikan masukan mengenai tambahan indikator berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. :

Bagaimana mengevaluasi berita website yang baik?



Gambar 15. Indikator Berita Yang Baik

Sumber:

- Indikator berita website yang baik menurut Kode Etik Jurnalistik – Dewan Pers (2012).
- Pedoman Pemberitaan Media Siber (2018).
- Asosiasi Media Siber Indonesia – *Trustworthy News Indicators* (2023).

2. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

a. Kompeten

Berdasarkan penjelasan di atas, tahapan kegiatan penyusunan konsep ini menghasilkan output berupa draft Berita SIMAS PUU (PUUEKUKESRA). Penyusunan Draft ini menunjukkan implementasi dari salah satu nilai BerAKHLAK, yaitu nilai Kompeten. Dimana nilai dari kompeten terbentuk dari dengan tersusunnya draft berita secara baik dan terstruktur.

b. Kolaboratif

Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor dengan tujuan untuk mendapat insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan.

c. Harmonis

Selain itu dengan adanya diskusi bersama mentor secara sehat akan membangun suasana lingkungan kerja yang harmonis serta hal ini dapat menjadi penunjang kinerja yang baik.

3. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

a. Manajemen ASN

Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Penyusunan konsep Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. Dengan adanya konsultasi bersama Mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan.

b. SMART ASN

Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk memahami konsep Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dan memahami data yang ada untuk dijadikan dasar menyusun konsep Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif.

4. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan pembuatan template berita dibuat untuk membuat sajian berita menjadi lebih rapi dan teratur, serta konsultasi mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi Pusat Perancangan Undang-Undang Ekuinbangkesra, yaitu “Menjadikan Pusat Perancangan Undnag-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.”

B.3. Menyusun SOP Sederhana Mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ketiga merupakan tindak lanjut dari selesainya kegiatan pembuatan template. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membuat susunan Alur dari pertama Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) direncanakan sampai pada tahapan akhir Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) selesai dipublikasi. Selain itu kegiatan ini ditujukan untuk penyelesaian dari setiap tahapan agar tergambar jelas mengenai setiap tahapan yang harus dilalui dan estimasi dari waktu proses berita tersebut dibuat hingga terpublikasi dengan baik. Berikut kegiatan dalam minggu ketiga, yang Penulis lalui:

a. Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Tahapan pertama dari kegiatan ketiga dari aktualisasi ini adalah menentukan Alur dari tahapan perencanaan hingga Berita terpublikasi di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Hal ini bertujuan untuk memudahkan Penulis untuk melihat alur perjalanan dari sebuah berita hingga siap terpublikasi dengan baik.

Bukti:

Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU



Gambar 16. Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU

Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

1. Perencanaan Konten (1 Hari Diluar Hari Kerja)

Pelaksana : Team Website SIMAS PUU
(puuekkukesra.dpr.go.id)

Langkah :

- Menentukan topik berita (kegiatan, regulasi baru, inovasi, capaian, atau agenda penting).
- Mengidentifikasi narasumber dan sumber data (unit kerja terkait).
- Menyusun outline berita sesuai kebijakan redaksi SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).

1. Penulisan Naskah Berita (1 Hari Diluar Hari Kerja)

Pelaksana : Kontributor / petugas publikasi.

Format umum Judul : Informatif, ≤ 12 kata, mencerminkan isi berita.

Lead (teras berita) : Menjawab unsur 5W + 1H (apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana).

Isi berita : Narasi kronologis, mencantumkan kutipan narasumber bila ada.

Penutup : Ringkasan manfaat/tujuan kegiatan atau rencana tindak lanjut.

Standar Bahasa : gaya jurnalistik positif, mencerminkan nilai ASN BerAKHLAK.

3. Review dan Persetujuan Internal (1 Hari - Hari Kerja)

Reviewer :

- Koreksi dari Team RUU yang bersangkutan
- Team Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Aspek yang ditinjau :

- Ketepatan data dan nama jabatan.
- Kepatuhan terhadap kaidah bahasa dan etika publikasi pemerintah.
- Relevansi dengan fungsi SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)(produk hukum, kegiatan kelembagaan, inovasi kebijakan).

4. Perbaikan atas Konten Berita (2 Hari - Hari Kerja)

Pelaksana :

Team Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)mengembalikan konten berita kepada penulis berita.

Aspek yang ditinjau :

perbaikan atas konten sesuai dengan permintaan team website dengan menyesuaikan standar penulisan yang telah ditetapkan oleh team website.

5. Validasi dan Publikasi

Persetujuan publikasi dari Team Website SIMAS PUU

(puuekkukesra.dpr.go.id)

- Memeriksa kembali substansi berita.
- Jika disetujui → klik **“Publish”**.

6. Distribusi dan Arsip (Nomor 5 & 6 : 1 Hari – Hari Kerja)

Setelah tayang, berita:

- Diunggah otomatis ke **beranda SIMAS PUU**
(puuekkukesra.dpr.go.id)
- Dapat dibagikan ke media sosial resmi PUU EKKUKESRA (Facebook, Instagram, X, dsb).
- Disimpan dalam **arsip digital** untuk laporan kinerja.

7. Monitoring & Evaluasi (1 Hari – Hari Kerja)

Evaluasi dilakukan bulanan oleh Team Website SIMAS

PUU (puuekkukesra.dpr.go.id):

- Jumlah berita yang terbit.
- Jumlah pembaca/engagement.
- Relevansi dengan sasaran strategis.

Hasil dievaluasi untuk peningkatan kualitas konten publikasi.

b. Menentukan Draft Artikel Berita untuk disesuaikan dengan template yang telah dibuat sebelumnya

Mentor memberikan masukan mengenai penggunaan template draft berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. :

**Perubahan RUU Sisdiknas dalam Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional,
Kesejahteraan Guru dan Dosen**

Ditulis pada 30 September 2025

(1)

Ikatan Sarjana Penan Indonesia (ISPI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (27/9/2025), menggelar Seminar Nasional dengan tema "Kajian Kritis Draf Rancangan Revisi (UU Sisdiknas):"

Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ruang Seminar Pascasarjana dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Kemendikisaintek, dan Kemendikdasmen.

(2)

Komisi X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk Menyusun Draf Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), selaku narasumber perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa "Pertunya perubahan RUU Sisdiknas ini dengan metode kodifikasi yang menggabungkan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi untuk membuat undang-undang dalam satu sistem pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, dan menghindari disharmoni peraturan perundang-undangan".

(3)

Dr. Wiwin menegaskan, permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, diantaranya meliputi: ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan; kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan optimal; serta perlunya perluasan cakupan wajib belajar.

"UU Sisdiknas telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini menjadikan pertunya ada perbaikan atas Undang-Undang ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk hal yang telah baik dan masih relevan tetap dipertahankan. Misal untuk pengaturan mengenai kesejahteraan guru dan dosen yang perlu diperkuat dalam RUU Sisdiknas ini, salah satunya melalui penegasan atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen" Ujar Dr. Wiwin.

Dr. Wiwin menjelaskan mengenai perluasan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun untuk pendidikan dasar kini menjadi 13 tahun yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dr. Wiwin juga menambahkan tentang penegasan pengaturan Pendidikan Keagamaan dan pendidikan pesantren, yang menjadi "Subject to Discuss" dalam pelaksanaan *Meaningful Public Participation* karena pendidikan pesantren telah diatur tersendiri

(4)

Gambar 17. Contoh Berita (1)

dalam Undang-Undang tentang Pesantren. Perlu memisahkan antara pengaturan terkait bidang pendidikan yang akan dilakukan kodifikasi dalam RUU Sisdiknas dan pengaturan terkait bidang pendidikan lainnya yang tidak turut dilakukan kodifikasi agar tidak saling tumpang tindih.

"Ketika berbicara tentang pendidikan diperlukan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini agar semua sektor dapat mengakses data-data pendidikan dengan baik dan benar", Ujar Dr. Wiwin. (5)

Selain Dr. Wiwin juga hadir Dr. Muhammad Yusra, S.Pd.,M.T dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas tentang perlunya RUU Sisdiknas dalam mengakomodir tentang teknologi dan isu pendidikan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dari Kemendikdasmen terdiri atas: Wajib belajar 13 tahun; Pelaksanaan pembelajaran; Anggaran pendidikan; Kewenangan pengelolaan anggaran; Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan pendidikan; Restrukturisasi pengelolaan guru; dan Tunjangan profesi guru.

Dr. Yusra membahas tentang urgensi perubahan dalam RUU Sisdiknas diperlukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu: Tantangan dalam menjawab relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan industri; irelevan dengan dinamika dan disrupsi sosial; jaminan perlindungan serta intimidasi terhadap guru; kompetensi pendidikan yang tidak merata; dan tumpang tindihnya penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Sementara itu, mewakili ISPI, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd, selaku Ketua Dewan Pembina ISPI memberikan masukan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban perlu diatur secara jelas dalam RUU Sisdiknas. Hal ini terkait tentang hak kepemilikan dari sekolah itu sebenarnya milik siapa; kemudian siapa yang menyediakan sumber daya manusia, sarana dan biaya; siapa yang mengontrol mutu dari sekolah yang telah ada.

"Mudah-mudahan tantangan pendidikan yang semakin berat ke depan, bisa dijawab dengan pendidikan yang semakin berkualitas, dan hal ini perlu dilandasi dengan regulasi yang betul-betul memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia kedepannya," Pungkasnya. (6)

Selain itu salah satu narasumber lain Dr. Ismail Hasan, S.H. MH perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksisaintek) mengingatkan agar norma-norma yang dirumuskan di DPR bersinergi dengan Kementerian-kementerian selaku pemangku kepentingan. Beliau juga menegaskan bahwa RUU ini perlu memperkuat argumentasi filosofis yang menjadi dasar yang kuat bahwa Pendidikan Adalah tugas konstutusional bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar serta ditukar dengan berbagai kepentingan lainnya. (7)

Penulis: Adelia. D

(8)

c. Membuat analisis dan evaluasi dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Mengidentifikasi Template Berita untuk dimuat di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). untuk melihat keakuratan sebuah berita, berdasarkan contoh template di atas:

(Pada gambar diatas terdapat nomor-nomor pada berita yang telah di kotak-kotakkan berdasarkan jenis dan bagian dari berita tersebut)

- (1) Judul dan Tanggal Berita dibuat.
- (2) Pihak Pelaksana Kegiatan dan Tempat dilaksanakannya Kegiatan.
- (3) Tujuan dilaksanakan kegiatan.
- (4) Narasumber utama
- (5) Pembahasan utama atas kegiatan.
- (6) Pembahasan tambahan atas kegiatan + Narasumber pendukung.
- (7) Penutup.
- (8) Nama Penulis.

2. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

a. Kompeten

Berdasarkan penjelasan di atas, menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar Alur Pelaksanaan Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik.

b. Akuntabel

Penentuan bentuk Artikel Berita yang akan dipublikasi di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan wujud sikap akuntabel, dimana dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegrasi tinggi dalam mengambil keputusan.

c. Adaptif

Mencerminkan perilaku yang adaptif, penulis secara proaktif membuat prototype dimana hasil analisis dan evaluasi dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id), merupakan bentuk inovasi produk yang diharapkan menjadi outcome dari SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) kedepannya.

3. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

a. Manajemen ASN

Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Pembuatan SOP Alur Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. Sesuai dengan asas profesionalitas, pemilihan untuk Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) didasarkan oleh adanya urgensi kebutuhan untuk mendirikan nilai akuntabel dan transparansi informasi kepada masyarakat yang menjadikan hal ini patut untuk dikaji. Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya.

b. SMART ASN

Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk membentuk Alur SOP Sederhana dalam Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Adanya pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan sajian informasi kepada masyarakat sehingga bukti bentuk tanggung jawab dalam transparansi proses legislasi mendorong terciptanya budaya integritas untuk bertanggungjawab atas Tindakan atau Keputusan. Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun analisis dan evaluasi hasil dari Artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).

4. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan pembuatan Alur SOP Sederhana dalam proses penerbitan Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi Pusat Perancangan Undang-Undang Ekuinbangkesra, yaitu “Menjadikan Pusat Perancangan Undnag-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.”

B.4. Melaksanakan Finalisasi Publikasi percobaan berita hasil Konsultasi Publik

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan tahapan percobaan ke-1 untuk Publikasi Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Pada tahapan ini, Penulis membuat finalisasi berita menggunakan template yang telah disiapkan dan telah diperiksa oleh Tim Website, Mentor dan Tim RUU terkait. Berikut ini rincian tahapan yang ada pada kegiatan keempat:

a. Konsultasi dengan Mentor

Sebelum melakukan kegiatan Publikasi Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id), Penulis terlebih dahulu berkoordinasi dengan Mentor terkait dengan persiapan berita yang di cek terlebih dahulu muatan beritanya sebelum dipublikasi ke dalam website. Kemudian Berita yang sudah dibuat mendapat perbaikan dari Tim RUU Terkait:

Ditulis pada 30 September 2025

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (27/9/2025), menggelar Seminar Nasional dengan tema "Kajian Kritis Terhadap Draf Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas):"

Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ruang Seminar Pascasarjana dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Kemendiknas, dan Kemendikdasmen.

Komisi X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk Menyusun Draf Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), selaku narasumber perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa "Perlunya perubahan RUU Sisdiknas ini karena diperlukan adanya dengan metode kodifikasi yang menggabungkan antara ketiga UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi untuk membuat regulasi undang-undang dalam satu sistem pendidikan yang komprehensif-komprehensif, berkesinambungan, dan menghindari ketimpangan dalam peraturan disahmonei peraturan perundang-undangan".

Dr. Wiwin menegaskan permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan nasional, diantaranya meliputi: ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan; kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan optimal; serta perlunya perluasan cakupan wajib belajar.

"UU Sisdiknas telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini menjadikan perlunya ada perbaikan atas Undang-Undang ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk hal yang telah baik dan masih relevan tetap dipertahankan. Misal untuk pengaturan mengenai kesejahteraan guru dan dosen yang perlu diperkuat dalam RUU Sisdiknas ini, salah satunya melalui penguatan atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen" Ujar Dr. Wiwin.

Dr. Wiwin menjelaskan mengenai ruang lingkup yang mengatur tentang jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdapat 2 hal yang disoroti yaitu, jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur, terencana, terencana serta berjenjang, yang terdiri atas: 1) Jenjang pendidikan anak usia dini; 2) Jenjang pendidikan dasar; 3) Jenjang pendidikan menengah dan 4) Jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan, jalur pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang bersifat sebagai pilihan alternatif atau kompeten dari pendidikan formal

Gambar 19 . Contoh Perbaikan Berita (1)

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas: 1) ~~Levelan~~ ~~pengasuhan anak~~; 2) Pendidikan kesetaraan; 3) Pendidikan kecakapan hidup; 4) Pendidikan kursus dan pelatihan; dan 5) Pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Hasil pendidikan nonformal dapat diakui sama/setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan.

~~Diusulkan paragraf diatas~~ untuk dihapus, karena memuat materi yang kurang utuh dengan dihapusnya pengaturan lanjutan mengenai pendidikan formal. Alt. untuk paragraf diatas:

Dr. Wiwin menjelaskan mengenai perluasan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun untuk pendidikan dasar kini menjadi 13 tahun yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dr. Wiwin juga menambahkan ~~Menyatakan~~ tentang ~~penegasan~~ pengaturan Pendidikan Keagamaan dan pendidikan pesantren, yang menjadi "Subject to Discuss" dalam pelaksanaan *Meaningful Public Participation* karena pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang tersendiri khusus: tentang Pesantren. Akibatnya, dalam Hal ini menjadikan kami harus membagi antara aturan yang telah ada dan poin-poin dalam RUU Sisdiknas ini. Perlu memisahkan agar terpisah antara pengaturan terkait bidang pendidikan yang ~~ada~~ akan dilakukan kodifikasi dengan pengaturan yang akan diatur dalam RUU Sisdiknas dan pengaturan terkait bidang pendidikan lainnya yang tidak turut dilakukan kodifikasi agar dan tidak saling tumpang tindih.

"Ketika berbicara tentang pendidikan diperlukan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini ~~dikarenakan~~ agar semua sektor dapat mengakses data-data pendidikan dengan baik dan benar", Ujar Dr. Wiwin.

Selain Dr. Wiwin juga hadir Dr. Muhammad Yusra, S.Pd., M.T dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas tentang perlunya RUU Sisdiknas dalam mengakomodir tentang teknologi dan isu pendidikan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dari Kemendikdasmen terdiri atas: Wajib belajar 13 tahun; Pelaksanaan pembelajaran; Anggaran pendidikan; Kewenangan pengelolaan anggaran; Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan pendidikan; Restrukturisasi pengelolaan guru; dan Tunjangan profesi guru.

~~Kemendikdisaintek~~ Dr. Yusra membahas tentang urgensi perubahan dalam RUU Sisdiknas diperlukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu: Tantangan dalam menjawab relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan industry; irelevan dengan dinamika dan disrupsi sosial; jaminan perlindungan serta intimidasi terhadap guru; kompetensi pendidikan yang tidak merata; dan tumpang tindihnya penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Sementara itu, mewakili ISPI, Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd, selaku Ketua Dewan Pembina ISPI memberikan masukan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban perlu diatur secara jelas dalam RUU Sisdiknas. Hal ini terkait tentang hak kepemilikan dari sekolah itu sebenarnya milik siapa; kemudian siapa yang menyediakan sumber daya manusia, sarana dan biaya; siapa yang mengontrol mutu dari sekolah yang telah ada.

"Mudah-mudahan tantangan pendidikan yang semakin berat ke depan, bisa dijawab dengan pendidikan yang semakin berkualitas, dan hal ini perlu dilandasi dengan regulasi yang betul-betul memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia kedepannya," Pungkasnya.

Selain itu salah satu narasumber lain Dr. Ismail Hasan, S.H. MH perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) mengingatkan agar norma-norma yang dirumuskan di DPR bersinergi dengan Kementerian-kementerian selaku pemangku kepentingan. Beliau juga menegaskan bahwa RUU ini perlu memperkuat argumentasi filosofis yang menjadi dasar yang kuat bahwa Pendidikan Adalah tugas konstutusional bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar serta ditukar dengan berbagai kepentingan lainnya.

Penulis: Adelia. D

Gambar 21 . Contoh Perbaikan Berita (3)

Berita setelah di edit oleh Penulis dan siap untuk dipublikasi:

Ditulis pada 30 September 2025

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (27/9/2025), menggelar Seminar Nasional dengan tema “Kajian Kritis Draf Rancangan Revisi (UU Sisdiknas).”

Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ruang Seminar Pascasarjana dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Kemendikisaintek, dan Kemendikdasmen.

Komisi X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk Menyusun Draf Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), selaku narasumber perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa “Perlunya perubahan RUU Sisdiknas ini dengan metode kodifikasi yang menggabungkan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi untuk membuat undang-undang dalam satu sistem pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, dan menghindari disharmoni peraturan perundang-undangan”.

Dr. Wiwin menegaskan, permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, diantaranya meliputi: ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan; kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan optimal; serta perlunya perluasan cakupan wajib belajar.

“UU Sisdiknas telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini menjadikan perlunya ada perbaikan atas Undang-Undang ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk hal yang telah baik dan masih relevan tetap dipertahankan. Misal untuk pengaturan mengenai kesejahteraan guru dan dosen yang perlu diperkuat dalam RUU Sisdiknas ini, salah satunya melalui penegasan atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen” Ujar Dr. Wiwin.

Dr. Wiwin menjelaskan mengenai perluasan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun untuk pendidikan dasar kini menjadi 13 tahun yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dr. Wiwin juga menambahkan tentang penegasan pengaturan Pendidikan Keagamaan dan pendidikan pesantren, yang menjadi “*Subject to Discuss*” dalam pelaksanaan *Meaningful Public Participation* karena pendidikan pesantren telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang tentang Pesantren. Perlu memisahkan antara pengaturan terkait bidang pendidikan yang akan dilakukan kodifikasi dalam RUU Sisdiknas dan pengaturan

terkait bidang pendidikan lainnya yang tidak turut dilakukan kodifikasi agar tidak saling tumpang tindih.

"Ketika berbicara tentang pendidikan diperlukan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini agar semua sektor dapat mengakses data-data pendidikan dengan baik dan benar", ujar Dr. Wiwin.

Selain Dr. Wiwin juga hadir Dr. Muhammad Yusra, S.Pd, M.T dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas tentang perlunya RUU Sisdiknas dalam mengakomodir tentang teknologi dan isu pendidikan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dari Kemendikdasmen terdiri atas: Wajib belajar 13 tahun; Pelaksanaan pembelajaran; Anggaran pendidikan; Kewenangan pengelolaan anggaran; Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan pendidikan; Restrukturisasi pengelolaan guru; dan Tunjangan profesi guru.

Dr. Yusra membahas tentang urgensi perubahan dalam RUU Sisdiknas diperlukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu: Tantangan dalam menjawab relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan industri; irelevan dengan dinamika dan disrupsi sosial; jaminan perlindungan serta intimidasi terhadap guru; kompetensi pendidikan yang tidak merata; dan tumpang tindihnya penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Sementara itu, mewakili ISPI, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd, selaku Ketua Dewan Pembina ISPI memberikan masukan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban perlu diatur secara jelas dalam RUU Sisdiknas. Hal ini terkait tentang hak kepemilikan dari sekolah itu sebenarnya milik siapa; kemudian siapa yang menyediakan sumber daya manusia, sarana dan biaya; siapa yang mengontrol mutu dari sekolah yang telah ada.

"Mudah-mudahan tantangan pendidikan yang semakin berat ke depan, bisa dijawab dengan pendidikan yang semakin berkualitas, dan hal ini perlu dilandasi dengan regulasi yang betul-betul memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia kedepannya," Pungkasnya.

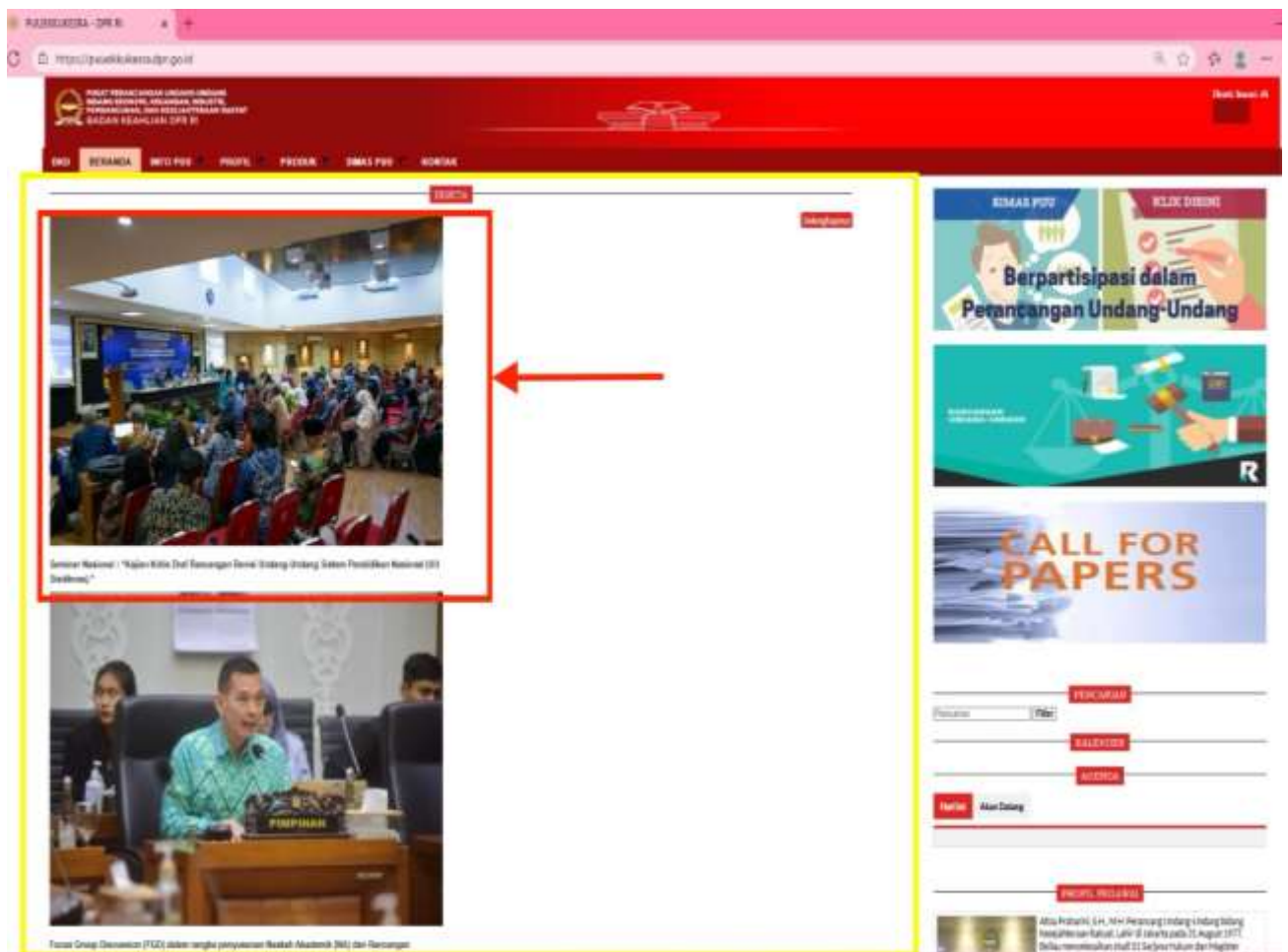
Selain itu salah satu narasumber lain Dr. Ismail Hasan, S.H. MH perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengingatkan agar norma-norma yang dirumuskan di DPR bersinergi dengan Kementerian-kementerian selaku pemangku kepentingan. Beliau juga menegaskan bahwa RUU ini perlu memperkuat argumentasi filosofis yang menjadi dasar yang kuat bahwa Pendidikan Adalah tugas konstitusional bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar serta ditukar dengan berbagai kepentingan lainnya.

Penulis: Adelia. D

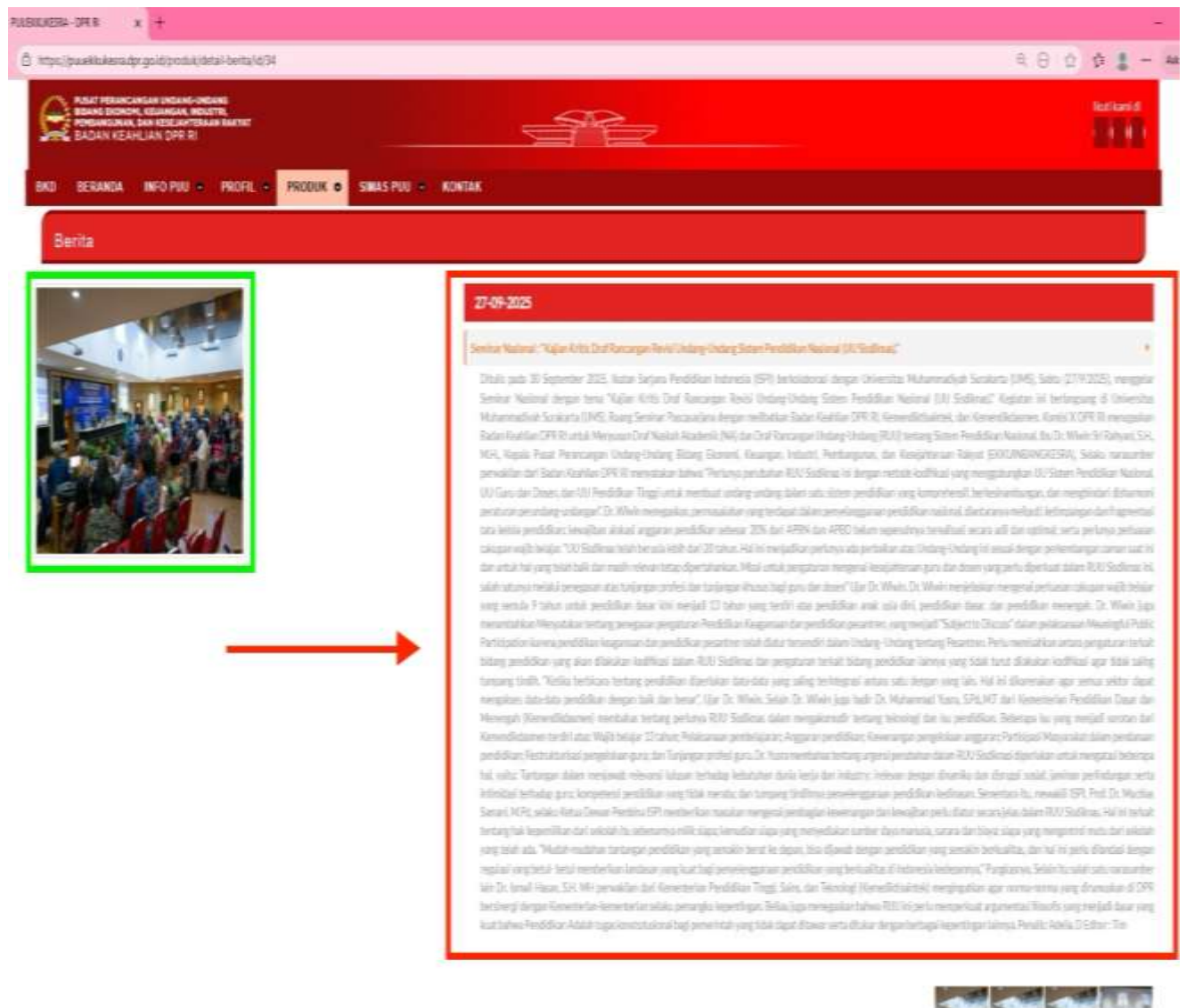
Gambar 23 . Berita setelah proses edit (2)

- b. **Publikasi Minimal 1 Berita hasil Konsultasi Publik dipublikasikan di Website (puuekkukesra.dpr.go.id) dengan Format yang terstruktur dan baku dan sesuai dengan template yang telah dibuat sebelumnya**

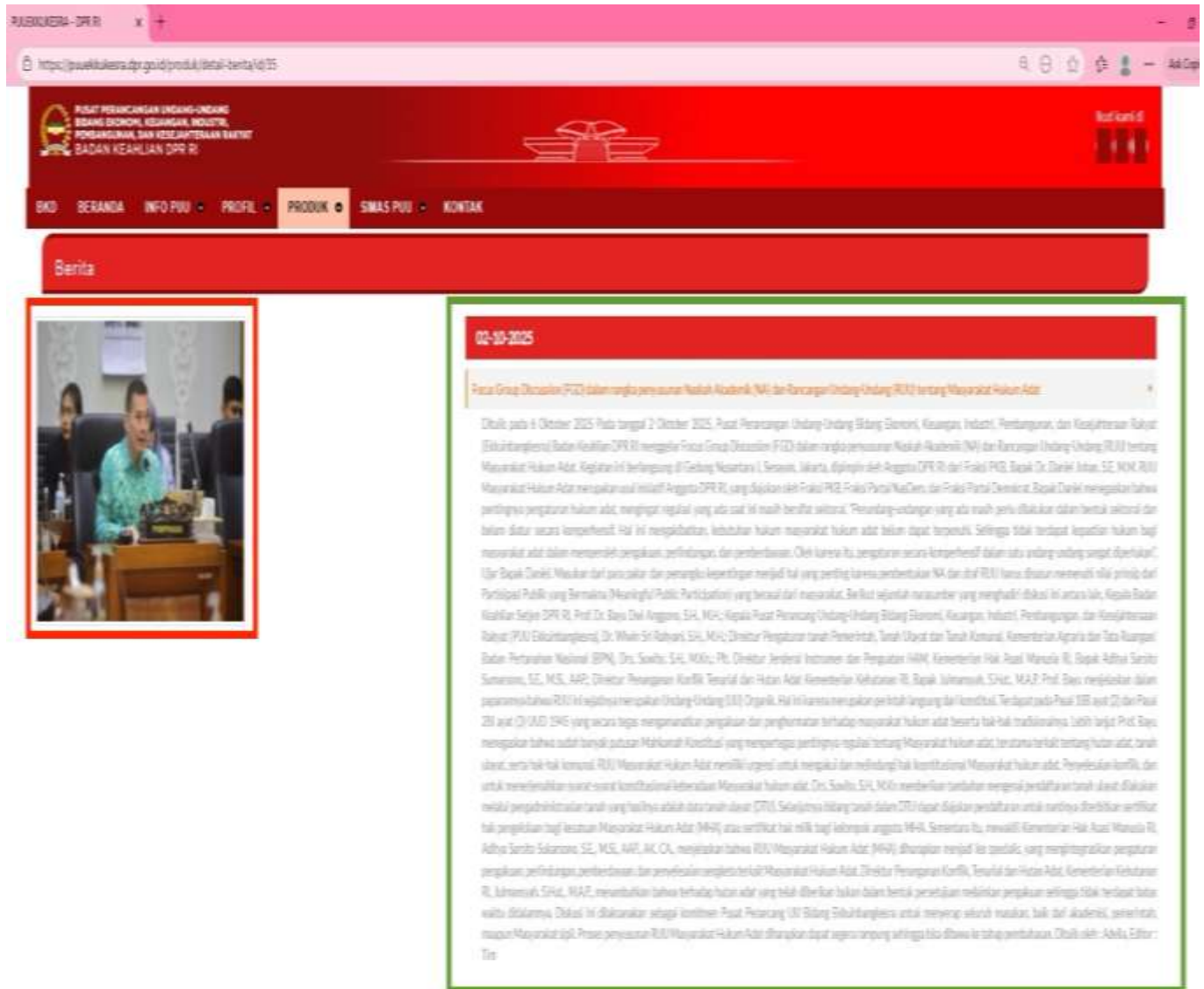
Tahapan berikutnya adalah Publikasi Berita setelah perbaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mentor, Tim Website dan Tim RUU terkait. Berikut Publikasi Berita yang telah dilakukan di beberapa minggu aktualisasi berjalan:



Gambar 24. Berita Pertama yang dipublikasi (Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)



Gambar 25 . Berita Pertama yang dipublikasi (Website SIMAS PUU
(puuekkukesra.dpr.go.id)



Gambar 26 . Berita Kedua yang dipublikasi (Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id))

2. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

a. Kolaboratif

Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan Mentor untuk mendapatkan *insight* baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan.

b. Harmonis

Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.

c. Adaptif

Mencerminkan perilaku yang adaptif, Penulis secara proaktif membuat Berita (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk dilakukan publikasi sesuai ketentuan alur SOP yang telah dibuat.

3. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

a. Manajemen ASN

Konsultasi dengan Mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. Penyusunan Prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya.

b. SMART ASN

Salah satu bagian penting dari Pembangunan dan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif. Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun analisis dan evaluasi hasil dari Artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).

4. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Dalam lingkup unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi Pusat Perancangan Undang-Undang Ekuinbangkesra, yaitu “Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.”

C. Stakeholders

Pelaksanaan aktualisasi ini memerlukan adanya Kerjasama dan Koordinasi untuk mendukung penyelesaian aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *stakeholder* yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusata Perancangan Undang-Undang Ekkuinbangkesra Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Koordinator Bidang Perancang Undang-Undang Ekkuinbangkesra; dan
3. Analisis Perancang Undang-Undang Ekkuinbangkesra.

D. Kendala dan Strategi

Proses pelaksanaan aktualisasi ini tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh Penulis. Berikut diantara kendala yang Penulis hadapi dalam melaksanakan aktualisasi:

No.	Prediksi Kendala	Kendala	Strategi
1.	Adanya perbedaan standar dan selera dalam hasil akhir dari Artikel Publikasi Berita di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)	Saat menyampaikan hasil pembuatan Berita untuk Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) berupa Prototype Berita, terdapat perbedaan prefrensi terhadap susunan template berita, maupun isi pada paragraf tertentu.	Masukan dapat diakomodasi dalam perbaikan-perbaikan kedepannya tanpa menghilangkan karakteristik dari penulis dan menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Tim Website.
2.	Adanya perbedaan jadwal terbit yang dimintakan untuk publikasi dari Tim Website dengan PUU.	Terdapat kendala pada saat menentukan Alur Publikasi Berita pada Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Baik dari jangka waktu maupun penetapan langkah-langkah yang	Perbedaan ini dapat diakomodir dengan mencari jalan tengah, agar kegiatan aktualisasi tidak mendapat hambatan dan ketentuan jadwal tayang dari Tim Website bisa terakomodir dengan baik.

		harus dilalui sebelum publikasi.	
--	--	----------------------------------	--

Tabel 8 . Kendala dan Strategi Aktualisasi

E. Analisis Dampak

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Penulis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai Berita perjalanan dari sebuah Peraturan Perundang-undangan dimana pada prosesnya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun dampak yang diberikan dari aktualisasi ini berdasarkan jangka waktunya ialah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

Dengan adanya Berita di kegiatan Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU, (puuekkukesra.dpr.go.id), menjadikan berita atas Konsultasi Publik lebih cepat untuk diberitakan kepada Legal Drafter yang ada di PUU Ekkkuinbangkesra. Adapun publikasi disalurkan melalui informasi di Whatsapp Group : Pusat PUU EkkkuinbangKesra dan Media Sosial Pribadi dari Penulis. Diharapkan hal ini bisa menjadi sosialisasi massif kepada seluruh Perancang Undang-Undang Badan Keahlian Setjen DPR RI.

2. Jangka Menengah

Dampak jangka menengah dari aktualisasi ini adalah Mendukung peningkatan hasil kerja dari Perancang Undang-Undang dalam menyajikan informasi yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat, agar masyarakat diharapkan Pusat Perancang Undang-Undang EkkkuinbangKesra dapat menghasilkan berita-berita yang bermanfaat dan menjadi tambahan sumber informasi bagi Perancang Undang-Undang dan Masyarakat. Dapat menghasilkan minimal 1 sampai 2 berita per bulan.

3. Jangka Panjang

Dampak jangka Panjang dari aktualisasi ini adalah diharapkan dapat:

- a. Dalam jangka Panjang, kegiatan Publikasi Berita pada Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) menjadi salah satu penyedia informasi terkini mengenai proses legislasi pada Konsultasi Publik yang terbuka dan akuntabel guna menghindari misinformasi kepada masyarakat.
- b. Dengan memberikan informasi yang terbuka dan akuntabel, diharapkan dalam jangka panjang dapat menaikkan minat masyarakat dalam berpartisipasi di

Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dan dapat mencapai nilai yang diharapkan dalam Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*).

- c. Meningkatkan dukungan Badan Keahlian kepada DPR RI dalam menaikan Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktualisasi ini mengangkat isu mengenai “Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) ” di Pusat Perancangan Undang-Undang Ekkuinbangkesra, Badan Keahlian DPR RI. Langkah yang diambil oleh Penulis sebagai tindak lanjut dalam mencari solusi mengenai persoalan di atas adalah dengan Mengadakan Kolom Berita pada Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) , dimana selain ketersediaan kolom berita yang menjadi wadah dari sebuah berita. Penulis juga membuat berita dengan ketentuan alur yang terstruktur dan langkah per langkah yang jelas. Tujuan dari pembuatan Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) ini tidak lain untuk mewujudkan outcome peningkatan kualitas dukungan kepada anggota dewan selaku user utama agar menjadi lebih optimal, juga secara umum bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai perkembangan dari kebijakan yang telah diputuskan dan pengetahuan mengenai sejauh mana masyarakat umum terlibat dalam pembuatan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU).

Penyelenggaraan aktualisasi pembuatan Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) ini dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan besar, yaitu Persiapan kegiatan analisis dan evaluasi isi dari Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); Penyusunan Template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk kegiatan Konsultasi Publik; Menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU; Melaksanakan Finalisasi Publikasi percobaan berita hasil Konsultasi Publik; dan Terakhir melakukan Sosialisasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) di PUU Ekkuinbangkesra. Pelaksanaan dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK, nilai Manajemen ASN dan SMART ASN, Juga selaras dengan visi-misi organisasi. Sehubungan dengan itu, diharapkan program aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi dan kebermanfaatan yang optimal bagi Pusat Perancang Undang-Undang Ekkuinbangkesra.

B. Saran

Kegiatan aktualisasi ini sepenuhnya dilaksanakn berdasarkan rancangan aktualisasi sebagaimana yang telah Penulis susun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk

dapat mencapai nilai kebermanfaatan secara maksimal diharapkan hasil aktualisasi ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang tersebar baik dari Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) maupun Di Media Sosial Instagram: @PUUEKR.BKDPRRI di Pusat Perancang Undang-Undang Ekuinbangkesra. Selain daripada itu, untuk mencapai kelancaran dalam melanjutkan program ini diperlukan penyempurnaan melalui kolaborasi dan koordinasi dari Penulis dengan berbagi stakeholders, terutama Tim Website PUU Ekuinbangkesra.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Mentoring

Formulir alat Bantu Mentoring Aktualisasi

Nama : Dea Adelia, S.H.
NIP : 199301282025062001
Unit Kerja : Pusat Perancangan undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra)
Jabatan : Perancang Undang-Undang Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Kegiatan 1 : Persiapan kegiatan analisis dari Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi; dan 2. Konsultasi dengan Mentor. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: 1. Laporan hasil riset; dan 2. Dokumentasi dan notulensi konsultasi. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 1. Manajemen ASN a. Pada tahap perencanaan, membiasakan diri melakukan riset terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja ASN.	1. Mengumpulkan informasi tentang contoh-contoh berita yang biasa dimuat dalam Website Resmi DPR RI. 2. Mengumpulkan referensi mengenai indikator-indikator berita yang baik.	

b. Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. 2. SMART ASN a. Mengimplementasikan digital skill dengan melakukan penelusuran data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber media. b. Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran luas yang solutif. Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan mengumpulkan bahan penyusunan buku melalui studi literatur serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat		
---	--	--

Perancanganan PUU Ekuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: 1. Kompeten Mengumpulkan informasi data selengkap mungkin merupakan salah satu upaya melaksanakan pekerjaan untuk memberikan kualitas terbaik merupakan implementasi ASN yang berkompeten. 2. Kolaboratif Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru sehingga memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan. 3. Harmonisasi Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.		
---	--	--

Kegiatan 2 : Penyusunan Template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk kegiatan Konsultasi Publik.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menyusun konsep dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); dan 2. Konsultasi dengan Mentor. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: (1) Draft Template Berita (puuekkukesra.dpr.go.id) yang berisikan tulisan dan foto kegiatan (2) Dokumentasi dan notulensi konsultasi Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN: (a) Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Penyusunan konsep Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. (b) Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan.	1. Pembuatan template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang terstruktur, teratur dan jelas urutan dari, misal: a. Waktu Berita dibuat b. Penjelasan Tempat c. Pembukaan berita d. Isi utama berita e. Penutup f. Nama Penulis 2. Memberikan contoh panduan penulisan.	

SMART ASN: (a) Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk memahami konsep Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dan memahami data yang ada untuk dijadikan dasar Menyusun konsep Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). (b) Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif. Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan mengumpulkan bahan penyusunan buku melalui studi literatur serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancanganan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: (a) Kompeten:		
--	--	--

Menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar draft yang terbentuk dapat tersusun secara baik dan terstruktur. (b) Kolaboratif: Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan, (c) Harmonis: Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.		
--	--	--

Kegiatan 3 : Penyusunan SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); 2. Menentukan Draft Artikel disesuaikan dengan template yang telah dibuat sebelumnya; dan 3. Konsultasi dengan Mentor. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: a. Draft SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); b. Menentukan Draft artikel berita untuk SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). c. Dokumen hasil analisis dan evaluasi. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN: a. Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Pembuatan SOP Alur Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. b. Sesuai dengan asas profesionalitas, pemilihan untuk Publikasi Berita	a. Pembuatan Alur Berita yang terstruktur dengan membuat SOP Sederhana dalam pelaksanaan perencanaan sampai dengan publikasi berita. b. Menentukan Draft Artikel untuk disesuaikan dengan template.	

SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) didasarkan oleh adanya urgensi kebutuhan untuk mendirikan nilai akuntabel dan transparansi informasi kepada masyarakat yang menjadikan hal ini patut untuk dikaji. c. Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya. SMART ASN: a. Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk membentuk Alur SOP Sederhana dalam Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). b. Adanya pertimbangan dalam memberikan sajian informasi kepada masyarakat sehingga bukti bentuk tanggung jawab atas Tindakan atau Keputusan. c. Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun analisis dan evaluasi hasil dari artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi:		
--	--	--

Kegiatan menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id), serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUSAT PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancanganan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: (a) Kompeten: Menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar Alur Pelaksanaan Berita (puuekkukesra.dpr.go.id) jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik. (b) Akuntabel: Penentuan bentuk dari Artikel berita yang akan dipublikasi di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan wujud sikap akuntabel, dimana dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi dalam mengambil Keputusan. (c) Adaptif: Mencerminkan perilaku yang adaptif, Penulis secara proaktif membuat		
---	--	--

prototype dimana hasil analisis dan evaluasi dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) (Hasil analisis dari Konsultasi Publik yang telah berlangsung dijadikan sebagai studi kasus untuk pembuatan berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id), merupakan bentuk inovasi produk yang diharapkan menjadi outcome dari SIMAS PUU PUUEKKUKESRA) kedepannya.		
--	--	--

Kegiatan 4 : Pelaksanaan Finalisasi Publikasi percobaan berita hasil konsultasi Publik

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan Mentor. 2. Minimal 1 Berita hasil Konsultasi Publik dipublikasikan di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dengan Format yang terstruktur, baku dan sesuai dengan template yang telah dibuat sebelumnya. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: a. Dokumentasi dan Notulensi Konsultasi. b. Dokumen Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang telah jadi mengikuti template yang telah dibuat. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN: a. Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seseorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. b. Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara	1. Memastikan berita terpublikasi dengan baik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). 2. Memastikan Tata Letak Berita sesuai di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).	

jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya. SMART ASN: - Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui Konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif. - Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk Menyusun analisis dan evaluasi hasil dari Artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancangan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: Kolaboratif		
--	--	--

Bersikap kolaboratif mellaui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan. b. Harmonis Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik. c. Adaptif Mencerminkan perilaku yang adaptif, Penulis secara proaktif membuat Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk dilakukan publikasi sesuai ketentuan alur SOP yang telah dibuat.		
---	--	--

Kegiatan 5 : Sosialisasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) di PUU Ekkuinbangkesra

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menyiapkan bahan pemaparan sosialisasi. 2. Menyerahkan dan/atau menyampaikan hasil pembuatan Artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). 3. Menyusun Laporan. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen digital untuk bahan paparan sosialisasi. 2. Dokumentasi. 3. Laporan Kegiatan. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN: a. Menyiapkan bahan paparan untuk sosialisasi melalui digital merupakan bentuk pembiasaan diri melakukan persiapan yang baik sebelum pelaksanaan kegiatan yang dapat mendorong terciptanya hasil kerja ASN yang lebih baik. b. Sesuai dengan asas akuntabilitas dalam pasal 2 UU ASN, maka hasil kerja yang dilakukan perlu untuk disosialisasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada Para Perancang Undang-Undang yang berada di Ekkuinbangkesra.	a. Memastikan berita terpublikasi dengan baik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). b. Memastikan Tata Letak Berita sesuai di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).	

c. Sesuai dengan asas akuntabilitas, bahwa setiap hasil kerja SMART ASN: (1) Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui Konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif. (2) Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk Menyusun analisis dan evaluasi hasil dari Artikel Berita SIMAS PUU. Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancanganan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: 1. Kolaboratif Bersikap kolaboratif mellaui cara berdiskusi dengan mentor untuk		
--	--	--

mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan. 2. Harmonis Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik. 3. Adaptif Mencerminkan perilaku yang adaptif, Penulis secara proaktif membuat Berita (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk dilakukan publikasi sesuai ketentuan alur SOP yang telah dibuat.		
--	--	--

Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching

FORMULIR ALAT BANTU

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

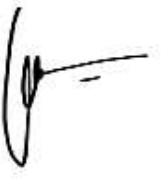
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XVIII TAHUN 2025

Nama : Dea Adelia

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

NIP : 199301282025062001

Nama Coach : Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1.	Jum'at, 26 September 2025	Konsultasi mengenai Penamaan judul dari Laporan Aktualisasi	Whatsapp	Penamaan judul dari Laporan Aktualisasi sebagaimana arahan dari mentor	
2.	Jum'at, 3 Oktober 2025	Monitoring dari hasil perbaikan seminar aktualisasi	Whatsapp	Monitoring dari hasil perbaikan tulisan serta masukan dari penguji kepada anak didik di dalam seminar aktualisasi.	
3.	Jum'at, 10 Oktober 2025	Monitoring mingguan terkait laporan minggu ke-1.	Whatsapp	(1) Melakukan pengumpulan data tentang format artikel berita yang ada di website DPR RI. (2) Mengidentifikasi halaman awal dari website SIMAS	

				PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). (3) Mengumpulkan indikator berita yang baik sebagai acuan standar baku dalam pembuatan berita.	
4.	Jum'at, 17 Oktober 2025	Monitoring mingguan terkait laporan minggu ke-2.	Whatsapp	(1) Melakukan pembuatan template untuk pembuatan berita. (2) Mengidentifikasi template berita yang akan dimuat di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). (3) Mengumpulkan indikator untuk evaluasi artikel berita yang baik.	
5.	Jum'at, 22 Oktober 2025	Monitoring mingguan terkait laporan minggu ke-3.	Whatsapp	(1) Pembuatan Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). (2) Melakukan Evaluasi atas Template yang telah diterapkan pada Artikel Berita sebelum Dipublikasi.	
6.	Rabu, 29 Oktober 2025	Monitoring mingguan terkait laporan minggu ke-4.	Whatsapp	Monitoring Berita yang telah terpublikasi pada website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id).	

7.	Rabu, 5 November 2025	Konsultasi laporan akhir aktualisasi dan persiapan sidang akhir aktualisasi. Serta Monitoring kegiatan minggu ke- 5.	Whatsapp	Laporan mengenai laporan akhir aktualisasi dan persiapan sidang akhir aktualisasi.	
----	--------------------------	---	----------	--	---



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO Jakarta KODE POS:10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 1

Nama : Dea Adelia

NIP : 199301282025062001

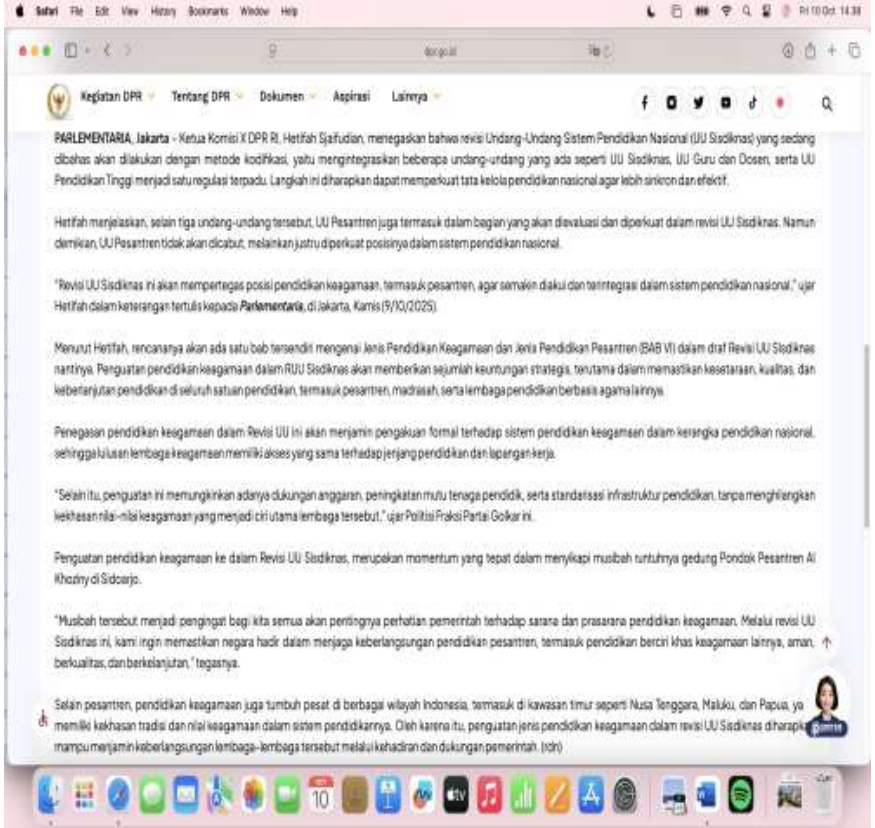
Unit Kerja : Pusat Perancangan undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra)

Isu : Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gagasan : 1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi; dan
2. Konsultasi dengan Mentor.

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Tahapan Kegiatan: (1) Melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi; dan (2) Konsultasi dengan Mentor. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: (1) Laporan hasil riset; dan (2) Dokumentasi dan notulensi konsultasi. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan:	 Masukan dari Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H. selaku Mentor, untuk masukan dan perbaikan di Minggu ke- 1:

(1) Manajemen ASN Pada tahap perencanaan, membiasakan diri melakukan riset terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja ASN. Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. (2) SMART ASN (1) Mengimplementasikan digital skill dengan melakukan penelusuran data dan	Mentor memberikan masukan berupa perbaikan untuk tugas yang sedang dikerjakan anak didik di minggu pertama. Dimana tahapan yang harus anak didik kerjakan di minggu pertama adalah: (2) Melakukan identifikasi pengumpulan data tentang bagaimana format artikel berita-berita yang ada di Website DPR RI, sebagai acuan untuk menulis berita pada Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Bukti: 
---	--

	informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber media. (2) Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran luas yang solutif. Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan mengumpulkan bahan penyusunan buku melalui studi literatur serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancangan PUU Ekkuinbangkesra sebagai	 (3) Mengidentifikasi Halaman Awal dari Website (puuekkukesra.dpr.go.id) untuk melihat dan mengukur bagian kolom berita: 
--	--	---

	organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: (1) Kompeten Mengumpulkan informasi data selengkap mungkin merupakan salah satu upaya melaksanakan pekerjaan untuk memberikan kualitas terbaik merupakan implementasi ASN yang berkompeten. (2) Kolaboratif Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru sehingga memberikan nilai tambah pada hasil pekerjaan. (3) Harmonisasi Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.	(4) Mentor memberikan masukan mengenai tambahan indikator berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. INDIKATOR BERITA YANG BAIK <table border="1"> <thead> <tr> <th>ASPEK PENILAIAN</th><th>INDIKATOR BERITA YANG BAIK</th><th>SKOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akurasi</td><td>Data dan kutipan sesuai fakta</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Relevansi</td><td>Sesuai topik dan kepentingan publik</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Objektivitas</td><td>Tidak memihak atau menilai</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Struktur Penulisan</td><td>Memiliki unsur 5W+1H</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Kelengkapan Informasi</td><td>Ada konteks, data pendukung, dan kutipan narasumber</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Gaya Bahasa</td><td>Bahasa baku, jelas, dan komunikatif</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Judul Berita</td><td>Dilengkapi foto, infografis, atau ilustrasi relevan</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Kredibilitas Sumber</td><td>Menarik dan mencerminkan isi</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Dampak dan Nilai informasi</td><td>Memberikan manfaat, inspirasi, atau pemahaman bagi pembaca</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR BERITA YANG BAIK	SKOR	Akurasi	Data dan kutipan sesuai fakta	5	Relevansi	Sesuai topik dan kepentingan publik	4	Objektivitas	Tidak memihak atau menilai	4	Struktur Penulisan	Memiliki unsur 5W+1H	3	Kelengkapan Informasi	Ada konteks, data pendukung, dan kutipan narasumber	4	Gaya Bahasa	Bahasa baku, jelas, dan komunikatif	3	Judul Berita	Dilengkapi foto, infografis, atau ilustrasi relevan	5	Kredibilitas Sumber	Menarik dan mencerminkan isi	5	Dampak dan Nilai informasi	Memberikan manfaat, inspirasi, atau pemahaman bagi pembaca	5
ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR BERITA YANG BAIK	SKOR																														
Akurasi	Data dan kutipan sesuai fakta	5																														
Relevansi	Sesuai topik dan kepentingan publik	4																														
Objektivitas	Tidak memihak atau menilai	4																														
Struktur Penulisan	Memiliki unsur 5W+1H	3																														
Kelengkapan Informasi	Ada konteks, data pendukung, dan kutipan narasumber	4																														
Gaya Bahasa	Bahasa baku, jelas, dan komunikatif	3																														
Judul Berita	Dilengkapi foto, infografis, atau ilustrasi relevan	5																														
Kredibilitas Sumber	Menarik dan mencerminkan isi	5																														
Dampak dan Nilai informasi	Memberikan manfaat, inspirasi, atau pemahaman bagi pembaca	5																														

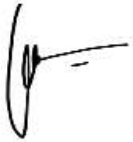
--	--	--

Jakarta, 10 Oktober 2025

Mengetahui,

Coach

Mentor




.....
Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si.

.....
Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO Jakarta KODE POS:10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 2

Nama : Dea Adelia

NIP : 199301282025062001

Unit Kerja : Pusat Perancangan undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra)

Isu : Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gagasan : 1. Menyusun konsep dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); dan
2. Konsultasi dengan Mentor.

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1	Tahapan Kegiatan: (1) Menyusun konsep dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); dan (2) Konsultasi dengan Mentor. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: (1) Draft Template Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang berisikan tulisan dan foto kegiatan (2) Dokumentasi dan notulensi konsultasi	 Masukan dari Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H. selaku Mentor, untuk masukan dan perbaikan di Minggu ke- 2:

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN: (1) Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Penyusunan konsep Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. (2) Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan. SMART ASN: (1) Menggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk memahami konsep Website SIMAS PUU	Mentor memberikan masukan berupa perbaikan untuk tugas yang sedang dikerjakan anak didik di minggu pertama. Dimana tahapan yang harus anak didik kerjakan di minggu pertama adalah: (1) Melakukan pembuatan template berita dimana adanya formula susunan berita yang terstruktur dan rapi. Hal ini berguna untuk memudahkan anak didik untuk membuat berita kedepannya. Bukti: Sumber berita https://www.youtube.com/live/BxedwoabUTo?si=BcJkIsRVK8r3qJm7 Perubahan RUU Sisdiknas dalam Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional, Kesejahteraan Guru dan Dosen Ditulis pada 30 September 2025 (1) Ikatan Sarjana Penan Indonesia (ISPI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (27/9/2025), menggelar Seminar Nasional dengan tema "Kajian Kritis Draf Rancangan Revisi (UU Sisdiknas):" Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ruang Seminar Pascasarjana dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Kemendiknas, dan Kemendikdasmen. (2) Komis X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk Menyusun Draf Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), selaku narasumber perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa "Perlunya perubahan RUU Sisdiknas ini dengan metode kodifikasi yang menggabungkan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi untuk membuat undang-undang dalam satu sistem pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, dan menghindari disharmoni peraturan perundang-undangan". (3) Dr. Wiwin menegaskan, permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, diantaranya meliputi: ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan; kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan optimal; serta perlunya perluasan cakupan wajib belajar. "UU Sisdiknas telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini menjadikan perlunya ada perbaikan atas Undang-Undang ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk hal yang telah baik dan masih relevan tetap dipertahankan. Misal untuk pengaturan mengenai kesejahteraan guru dan dosen yang perlu diperkuat dalam RUU Sisdiknas ini, salah satunya melalui penegasan atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen" Ujar Dr. Wiwin. Dr. Wiwin menjelaskan mengenai perluasan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun untuk pendidikan dasar kini menjadi 13 tahun yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dr. Wiwin juga menambahkan tentang penegasan pengaturan Pendidikan Keagamaan dan pendidikan pesantren, yang menjadi "Subject to Discuss" dalam pelaksanaan <i>Meaningful Public Participation</i> karena pendidikan pesantren telah diatur tersendiri (4)
---	--

(puuekkukesra.dpr.go.id) dan memahami data yang ada untuk dijadikan dasar Menyusun konsep Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). (2) Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif. Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan mengumpulkan bahan penyusunan buku melalui studi literatur serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancangan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang	dalam Undang-Undang tentang Pesantren. Perlu memisahkan antara pengaturan terkait bidang pendidikan yang akan dilakukan kodifikasi dalam RUU Sisdiknas dan pengaturan terkait bidang pendidikan lainnya yang tidak turut dilakukan kodifikasi agar tidak saling tumpang tindih. "Ketika berbicara tentang pendidikan diperlukan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini agar semua sektor dapat mengakses data-data pendidikan dengan baik dan benar", Ujar Dr. Wiwin. (5) Selain Dr. Wiwin juga hadir Dr. Muhammad Yusra, S.Pd., M.T dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas tentang perlunya RUU Sisdiknas dalam mengkomodir tentang teknologi dan isu pendidikan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dari Kemendikdasmen terdiri atas: Wajib belajar 13 tahun; Pelaksanaan pembelajaran; Anggaran pendidikan; Kewenangan pengelolaan anggaran; Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan pendidikan; Restrukturisasi pengelolaan guru; dan Tunjangan profesi guru. Dr. Yusra membahas tentang urgensi perubahan dalam RUU Sisdiknas diperlukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu: Tantangan dalam menjawab relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan industri; irelevan dengan dinamika dan disrupsi sosial; jaminan perlindungan serta intimidasi terhadap guru; kompetensi pendidikan yang tidak merata; dan tumpang tindihnya penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Sementara itu, mewakili ISPI, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd, selaku Ketua Dewan Pembina ISPI memberikan masukan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban perlu diatur secara jelas dalam RUU Sisdiknas. Hal ini terkait tentang hak kepemilikan dari sekolah itu sebenarnya milik siapa; kemudian siapa yang menyediakan sumber daya manusia, sarana dan biaya; siapa yang mengontrol mutu dari sekolah yang telah ada. "Mudah-mudahan tantangan pendidikan yang semakin berat ke depan, bisa dijawab dengan pendidikan yang semakin berkualitas, dan hal ini perlu dilandasi dengan regulasi yang betul-betul memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia kedepannya," Pungkasnya. (6) Selain itu salah satu narasumber lain Dr. Ismail Hasan, S.H. MH perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengingatkan agar norma-norma yang dirumuskan di DPR bersinergi dengan Kementerian-kementerian selaku pemangku kepentingan. Beliau juga menegaskan bahwa RUU ini perlu memperkuat argumentasi filosofis yang menjadi dasar yang kuat bahwa Pendidikan Adalah tugas konstitusional bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar serta ditukar dengan berbagai kepentingan lainnya. (7) Penulis: Adelia. D (8) (2) Mengidentifikasi Template Berita untuk dimuat di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). untuk melihat keakuratan sebuah berita, berdasarkan contoh template di atas: (Pada gambar diatas terdapat nomor-nomor pada berita yang telah di kotak-kotakkan berdasarkan jenis dan bagian dari berita tersebut) (1) Judul dan Tanggal Berita dibuat. (2) Pihak Pelaksana Kegiatan dan Tempat dilaksanakannya Kegiatan. (3) Tujuan dilaksanakan kegiatan. (4) Narasumber utama (5) Pembahasan utama atas kegiatan. (6) Pembahasan tambahan atas kegiatan + Narasumber pendukung. (7) Penutup. (8) Nama Penulis.
---	--

Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: (1) Kompeten: Menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar draft yang terbentuk dapat tersusun secara baik dan terstruktur. (2) Kolaboratif: Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan, (3) Harmonis: Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.	(3) Mentor memberikan masukan mengenai tambahan indikator berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. : Bagaimana mengevaluasi berita website yang baik? Kesesuaian Judul & Isi Memastikan judul sesuai dengan isi dan tidak clickbait. Verifikasi Digital Memverifikasi berita sebelum publikasi online untuk mencegah informasi yang salah. Etika & Privasi Menjaga privasi dan menghindari diskriminasi atau eksploitasi. Keseimbangan Narasumber Mengkonfirmasi bahwa semua pihak yang relevan telah diberi kesempatan untuk menanggapi. Akurasi & Kebenaran Fakta Memastikan berita didasarkan pada fakta yang diverifikasi dan tidak mengandung opini pribadi. Transparansi Redaksi Menampilkan identitas redaksi dan informasi kontak untuk akuntabilitas. Kebijakan Koreksi Publik Menyediakan kebijakan koreksi yang jelas untuk akuntabilitas. Kecepatan & Pemberian Informasi Memperbarui berita dengan perkembangan terbaru untuk menjaga relevansi. Desain & Aksesibilitas Website Memastikan website responsif, rapi, dan mudah dibaca. Sumber: - Indikator berita website yang baik menurut Kode Etik Jurnalistik – Dewan Pers (2012). - Pedoman Pemberitaan Media Siber (2018). - Asosiasi Media Siber Indonesia – <i>Trustworthy News Indicators</i> (2023).
--	--

Jakarta, 17 Oktober 2025

Mengetahui,

Mentor

Coach



.....
Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si.



.....
Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO Jakarta KODE POS:10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 3

Nama : Dea Adelia

NIP : 199301282025062001

Unit Kerja : Pusat Perancangan undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra)

Isu : Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gagasan : 1. Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id);

2. Menentukan Draft Artikel disesuaikan dengan template yang telah dibuat sebelumnya; dan

3. Konsultasi dengan Mentor.

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1	Tahapan Kegiatan: A. Menyusun konsep SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id); B. Menentukan Draft Artikel disesuaikan dengan	

	template yang telah dibuat sebelumnya; dan C. Konsultasi dengan Mentor. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: (1) Draft SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesr a.dpr.go.id). (2) Menentukan Draft artikel berita untuk SIMAS PUU (puuekkukesr a.dpr.go.id). (3) Dokumen hasil analisis dan evaluasi. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN:	Masukan dari Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H. Selaku Mentor, untuk masukan dan perbaikan di Minggu ke- 3: Mentor memberikan masukan berupa perbaikan untuk tugas yang sedang dikerjakan anak didik di minggu ketiga. Dimana tahapan yang harus anak didik kerjakan di minggu ketiga adalah: (a) Melakukan pembuatan SOP Sederhana berita dimana adanya formula alur tahapan susunan berita yang terstruktur dan rapi. Hal ini berguna untuk memudahkan anak didik untuk membuat berita kedepannya. Bukti: Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU <pre> graph LR A[Perencanaan Konten Menentukan topik berita dan sumber data] --> B[Penulisan Naskah Berita Menyusun berita dengan format dan standar] B --> C[Review dan Persetujuan Internal Memeriksa akurasi dan relevansi berita] C --> D[Perbaikan atas Konten Berita Mengembalikan konten berita kepada penulis berita] D --> E[Validasi dan Publikasi Menyetujui dan menerbitkan berita di website] E --> F[Distribusi dan Arsip Membagikan berita di media sosial dan mengarsipkan] F --> G[Monitoring & Evaluasi Mengevaluasi kinerja berita dan engagement] </pre> <u>Alur Publikasi Berita di Website SIMAS PUU</u> 1. Perencanaan Konten (1 Hari Diluar Hari Kerja) Pelaksana : Team Website SIMAS PUU Langkah : • Menentukan topik berita (kegiatan, regulasi baru, inovasi, capaian, atau agenda penting). • Mengidentifikasi narasumber dan sumber data (unit kerja terkait).
--	---	--

	(1) Sesuai dengan tujuan adanya Manajemen ASN, Pembuatan SOP Alur Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.a.dpr.go.id) merupakan salah satu perwujudan ASN yang profesional untuk menghasilkan hasil kerja terbaik. (2) Sesuai dengan asas profesionalitas, pemilihan untuk Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.a.dpr.go.id) didasarkan oleh adanya	- Menyusun outline berita sesuai kebijakan redaksi SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) 2. Penulisan Naskah Berita (1 Hari Diluar Hari Kerja) Pelaksana : Kontributor / petugas publikasi. Format umum Judul : Informatif, ≤ 12 kata, mencerminkan isi berita. Lead (teras berita) : Menjawab unsur 5W + 1H (apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana). Isi berita : Narasi kronologis, mencantumkan kutipan narasumber bila ada. Penutup : Ringkasan manfaat/tujuan kegiatan atau rencana tindak lanjut. Standar Bahasa : gaya jurnalistik positif, mencerminkan Nilai ASN BerAKHLAK. 3. Review dan Persetujuan Internal (1 Hari - Hari Kerja) Reviewer : - Koreksi dari Team RUU yang bersangkutan - Team Website SIMAS PUU Aspek yang ditinjau : - Ketepatan data dan nama jabatan. - Kepatuhan terhadap kaidah bahasa dan etika publikasi pemerintah. - Relevansi dengan fungsi SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)(produk hukum, kegiatan kelembagaan, inovasi kebijakan). 4. Perbaikan atas Konten Berita (2 Hari - Hari Kerja) Pelaksana :
--	---	---

	urgensi kebutuhan untuk mendirikan nilai akuntabel dan transparansi informasi kepada masyarakat k yang menjadikan hal ini patut untuk dikaji. (3) Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya. SMART ASN: (1) Menggunaka n	<table><tr><th>Team</th><th>Website</th><th>SIMAS</th><th>PUU</th></tr><tr><td colspan="4">(puuekkukesra.dpr.go.id)mengembalikan konten berita kepada penulis berita.</td></tr><tr><td colspan="4">Aspek yang ditinjau :</td></tr><tr><td colspan="4">perbaikan atas konten sesuai dengan permintaan team website dengan menyesuaikan standar penulisan yang telah ditetapkan oleh team website.</td></tr><tr><td colspan="4">5. Validasi dan Publikasi</td></tr><tr><td colspan="4">Persetujuan publikasi dari Team Website SIMAS PUU</td></tr><tr><td colspan="4"> • Memeriksa kembali substansi berita. • Jika disetujui → klik “Publish”. </td></tr><tr><td colspan="4">6. Distribusi dan Arsip (Nomor 5 & 6 : 1 Hari – Hari Kerja)</td></tr><tr><td colspan="4">Setelah tayang, berita:</td></tr><tr><td colspan="4"> • Diunggah otomatis ke beranda SIMAS PUU. • Dapat dibagikan ke media sosial resmi PUU EKKUKESRA (Facebook, Instagram, X, dsb). • Disimpan dalam arsip digital untuk laporan kinerja. </td></tr><tr><td colspan="4">7. Monitoring & Evaluasi (1 Hari – Hari Kerja)</td></tr><tr><td colspan="4">Evaluasi dilakukan bulanan oleh Team Website SIMAS PUU:</td></tr><tr><td colspan="4"> • Jumlah berita yang terbit. • Jumlah pembaca/engagement. • Relevansi dengan sasaran strategis. </td></tr><tr><td colspan="4">Hasil dievaluasi untuk peningkatan kualitas konten publikasi.</td></tr><tr><td colspan="4">(b) Mentor memberikan masukan mengenai penggunaan template draft berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. :</td></tr></table>	Team	Website	SIMAS	PUU	(puuekkukesra.dpr.go.id)mengembalikan konten berita kepada penulis berita.				Aspek yang ditinjau :				perbaikan atas konten sesuai dengan permintaan team website dengan menyesuaikan standar penulisan yang telah ditetapkan oleh team website.				5. Validasi dan Publikasi				Persetujuan publikasi dari Team Website SIMAS PUU				• Memeriksa kembali substansi berita. • Jika disetujui → klik “Publish”.				6. Distribusi dan Arsip (Nomor 5 & 6 : 1 Hari – Hari Kerja)				Setelah tayang, berita:				• Diunggah otomatis ke beranda SIMAS PUU. • Dapat dibagikan ke media sosial resmi PUU EKKUKESRA (Facebook, Instagram, X, dsb). • Disimpan dalam arsip digital untuk laporan kinerja.				7. Monitoring & Evaluasi (1 Hari – Hari Kerja)				Evaluasi dilakukan bulanan oleh Team Website SIMAS PUU:				• Jumlah berita yang terbit. • Jumlah pembaca/engagement. • Relevansi dengan sasaran strategis.				Hasil dievaluasi untuk peningkatan kualitas konten publikasi.				(b) Mentor memberikan masukan mengenai penggunaan template draft berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. :			
Team	Website	SIMAS	PUU																																																											
(puuekkukesra.dpr.go.id)mengembalikan konten berita kepada penulis berita.																																																														
Aspek yang ditinjau :																																																														
perbaikan atas konten sesuai dengan permintaan team website dengan menyesuaikan standar penulisan yang telah ditetapkan oleh team website.																																																														
5. Validasi dan Publikasi																																																														
Persetujuan publikasi dari Team Website SIMAS PUU																																																														
• Memeriksa kembali substansi berita. • Jika disetujui → klik “Publish”.																																																														
6. Distribusi dan Arsip (Nomor 5 & 6 : 1 Hari – Hari Kerja)																																																														
Setelah tayang, berita:																																																														
• Diunggah otomatis ke beranda SIMAS PUU. • Dapat dibagikan ke media sosial resmi PUU EKKUKESRA (Facebook, Instagram, X, dsb). • Disimpan dalam arsip digital untuk laporan kinerja.																																																														
7. Monitoring & Evaluasi (1 Hari – Hari Kerja)																																																														
Evaluasi dilakukan bulanan oleh Team Website SIMAS PUU:																																																														
• Jumlah berita yang terbit. • Jumlah pembaca/engagement. • Relevansi dengan sasaran strategis.																																																														
Hasil dievaluasi untuk peningkatan kualitas konten publikasi.																																																														
(b) Mentor memberikan masukan mengenai penggunaan template draft berita yang baik sesuai dengan arahan dari Penguji yaitu Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P dan Coach yaitu Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si. :																																																														

	kemampuan dalam literasi digital untuk membentuk Alur SOP Sederhana dalam Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). (2) Adanya pertimbangan dalam memberikan sajian informasi kepada masyarakat sehingga bukti bentuk tanggung jawab atas Tindakan atau Keputusan. (3) Menggunaka n digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk	Perubahan RUU Sisdiknas dalam Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional, Kesejahteraan Guru dan Dosen Ditulis pada 30 September 2025 (1) Ikatan Sarjana Penan Indonesia (ISPI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (27/9/2025), menggelar Seminar Nasional dengan tema "Kajian Kritis Draf Rancangan Revisi (UU Sisdiknas):" Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ruang Seminar Pascasarjana dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Kemendikdasmen, dan (2) Komisi X DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk Menyusun Draf Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (EKKUINBANGKESRA), selaku narasumber perwakilan dari Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa "Perlunya perubahan RUU Sisdiknas ini dengan metode kodifikasi yang menggabungkan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi untuk membuat undang-undang dalam satu sistem pendidikan yang komprehensif, berkesinambungan, dan menghindari disharmoni peraturan perundang-undangan". (3) Dr. Wiwin menegaskan, permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, diantaranya meliputi: ketimpangan dan fragmentasi tata kelola pendidikan; kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan optimal; serta perlunya perluasan cakupan wajib belajar. "UU Sisdiknas telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini menjadikan perlunya ada perbaikan atas Undang-Undang ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan untuk hal yang telah baik dan masih relevan tetap dipertahankan. Misal untuk pengaturan mengenai kesejahteraan guru dan dosen yang perlu diperkuat dalam RUU Sisdiknas ini, salah satunya melalui penegasan atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dan dosen" Ujar Dr. Wiwin. Dr. Wiwin menjelaskan mengenai perluasan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun untuk pendidikan dasar kini menjadi 13 tahun yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dr. Wiwin juga menambahkan tentang penegasan pengaturan Pendidikan Keagamaan dan pendidikan pesantren, yang menjadi "Subject to Discuss" dalam pelaksanaan <i>Meaningful Public Participation</i> karena pendidikan pesantren telah diatur tersendiri (4)
--	--	---

	menyusun analisis dan evaluasi hasil dari artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal. Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancanganan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi	dalam Undang-Undang tentang Pesantren. Perlu memisahkan antara pengaturan terkait bidang pendidikan yang akan dilakukan kodifikasi dalam RUU Sisdiknas dan pengaturan terkait bidang pendidikan lainnya yang tidak turut dilakukan kodifikasi agar tidak saling tumpang tindih. "Ketika berbicara tentang pendidikan diperlukan data-data yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini agar semua sektor dapat mengakses data-data pendidikan dengan baik dan benar", Ujar Dr. Wiwin. (5) Selain Dr. Wiwin juga hadir Dr. Muhammad Yusra, S.Pd.,M.T dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas tentang perlunya RUU Sisdiknas dalam mengakomodir tentang teknologi dan isu pendidikan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dari Kemendikdasmen terdiri atas: Wajib belajar 13 tahun; Pelaksanaan pembelajaran; Anggaran pendidikan; Kewenangan pengelolaan anggaran; Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan pendidikan; Restrukturisasi pengelolaan guru; dan Tunjangan profesi guru. Dr. Yusra membahas tentang urgensi perubahan dalam RUU Sisdiknas diperlukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu: Tantangan dalam menjawab relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan industri; irelevan dengan dinamika dan disrupsi sosial; jaminan perlindungan serta intimidasi terhadap guru; kompetensi pendidikan yang tidak merata; dan tumpang tindihnya penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Sementara itu, mewakili ISPI, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd, selaku Ketua Dewan Pembina ISPI memberikan masukan mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban perlu diatur secara jelas dalam RUU Sisdiknas. Hal ini terkait tentang hak kepemilikan dari sekolah itu sebenarnya milik siapa; kemudian siapa yang menyediakan sumber daya manusia, sarana dan biaya; siapa yang mengontrol mutu dari sekolah yang telah ada. "Mudah-mudahan tantangan pendidikan yang semakin berat ke depan, bisa dijawab dengan pendidikan yang semakin berkualitas, dan hal ini perlu dilandasi dengan regulasi yang betul-betul memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia kedepannya," Pungkasnya. (6) Selain itu salah satu narasumber lain Dr. Ismail Hasan, S.H. MH perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengingatkan agar norma-norma yang dirumuskan di DPR bersinergi dengan Kementerian-kementerian selaku pemangku kepentingan. Beliau juga menegaskan bahwa RUU ini perlu memperkuat argumentasi filosofis yang menjadi dasar yang kuat bahwa Pendidikan Adalah tugas konstutusional bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar serta ditukar dengan berbagai kepentingan lainnya. (7) Penulis: Adelia. D (8)
--	--	---

2

(c) Mengidentifikasi Template Berita untuk dimuat di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). untuk melihat keakuratan sebuah berita, berdasarkan contoh template di atas:

(Pada gambar diatas terdapat nomor-nomor pada berita yang telah di kotak-kotakkan berdasarkan jenis dan bagian dari berita tersebut)

1. Judul dan Tanggal Berita dibuat.
2. Pihak Pelaksana Kegiatan dan Tempat dilaksanakannya Kegiatan.

pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.	3. Tujuan dilaksanakan kegiatan. 4. Narasumber utama 5. Pembahasan utama atas kegiatan. 6. Pembahasan tambahan atas kegiatan + Narasumber pendukung. 7. Penutup. 8. Nama Penulis.
Penguatan Nilai BerAKHLAK: (1) Kompeten: Menyusun konsep terlebih dahulu merupakan bagian dari implementasi nilai kompeten agar Alur Pelaksanaan Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik. (2) Akuntabel: Penentuan bentuk dari Artikel berita yang akan dipublikasi di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) merupakan wujud sikap	

	akuntabel, dimana dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi dalam mengambil Keputusan. (3) Adaptif: Mencerminkan perilaku yang adaptif, Penulis secara proaktif membuat prototype dimana hasil analisis dan evaluasi dari Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dp.r.go.id)(Hasil analisis dari Konsultasi Publik yang telah berlangsung dijadikan sebagai studi kasus untuk pembuatan berita SIMAS PUU), merupakan bentuk inovasi produk yang diharapkan menjadi outcome dari SIMAS PUU	
--	---	--

	(puuekkukesra.dp r.go.id)kedepanny a.	
--	---	--

Jakarta, 22 Oktober 2025

Mengetahui,

Coach

Mentor




.....
Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si.

.....
Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO Jakarta KODE POS:10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 4

Nama : Dea Adelia

NIP : 199301282025062001

Unit Kerja : Pusat Perancangan undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra)

Isu : Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gagasan : 1. Konsultasi dengan Mentor.

2. Minimal 1 berita hasil Konsultasi Publik dipublikasikan di Website SIMAS PUU dengan Format yang terstruktur baku dan sesuai dengan template yang telah dibuat sebelumnya.

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Tahapan Kegiatan: (a) Konsultasi dengan Mentor (b) Minimal 1 berita hasil Konsultasi Publik dipublikasikan di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) dengan Format yang terstruktur baku dan sesuai dengan template yang telah dibuat sebelumnya. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: (a) Dokumentasi dan Notulensi Konsultasi (b) Dokumen Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) yang	Masukan dari Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H. Selaku Mentor, untuk masukan dan perbaikan di Minggu ke- 4: Mentor memberikan masukan berupa perbaikan untuk tugas yang sedang dikerjakan anak didik di minggu keempat. Dimana tahapan yang harus anak didik kerjakan di minggu ketempat adalah: 1. Publikasi Berita di SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)(puuekkukesra.dpr.go.id) :

telah jadi mengikuti template yang telah dibuat.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN:

- (a) Konsultasi dengan mentor dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran bagi seorang CPNS dengan senior di unit kerja agar mendapatkan wawasan mendalam terkait substansi yang dikerjakan maupun proses bisnis di unit kerja agar tetap relevan.
- (b) Penyusunan prototype hasil dari analisis dan evaluasi dilakukan secara jujur, cermat dan bertanggungjawab untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja yang tinggi kedepannya.

SMART ASN:

- (a) Salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN adalah membentuk ASN yang berwawasan global sebagaimana profil sebagai SMART ASN. Melalui konsultasi, dapat tercipta pertukaran pikiran yang solutif.
- (b) Menggunakan digital skill dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun analisis dan evaluasi hasil dari artikel Berita SIMAS PUU.



2. Artikel di Publikasi di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) :



Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi:

Kegiatan menyusun SOP Sederhana mengenai Alur Publikasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)serta konsultasi dengan mentor ini sesuai dengan misi Setjen DPR RI terkait dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal.

Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancanganan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.

Penguatan Nilai BerAKHLAK:

1. Kolaboratif

Bersikap kolaboratif melalui cara berdiskusi dengan mentor untuk mendapatkan insight baru dan nilai tambah pada hasil pekerjaan.

2. Harmonis

Selain itu dengan diskusi yang sehat akan turut membangun lingkungan kerja yang harmonis untuk menunjang kinerja yang baik.

3. Adaptif

Mencerminkan perilaku yang adaptif, penulis secara proaktif membuat Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)untuk dilakukan publikasi sesuai ketentuan alur SOP yang telah dibuat.

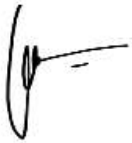


Jakarta, 06 November 2025

Mengetahui,

Coach

Mentor



.....

Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si.



.....

Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO Jakarta KODE POS:10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 5

Nama : Dea Adelia

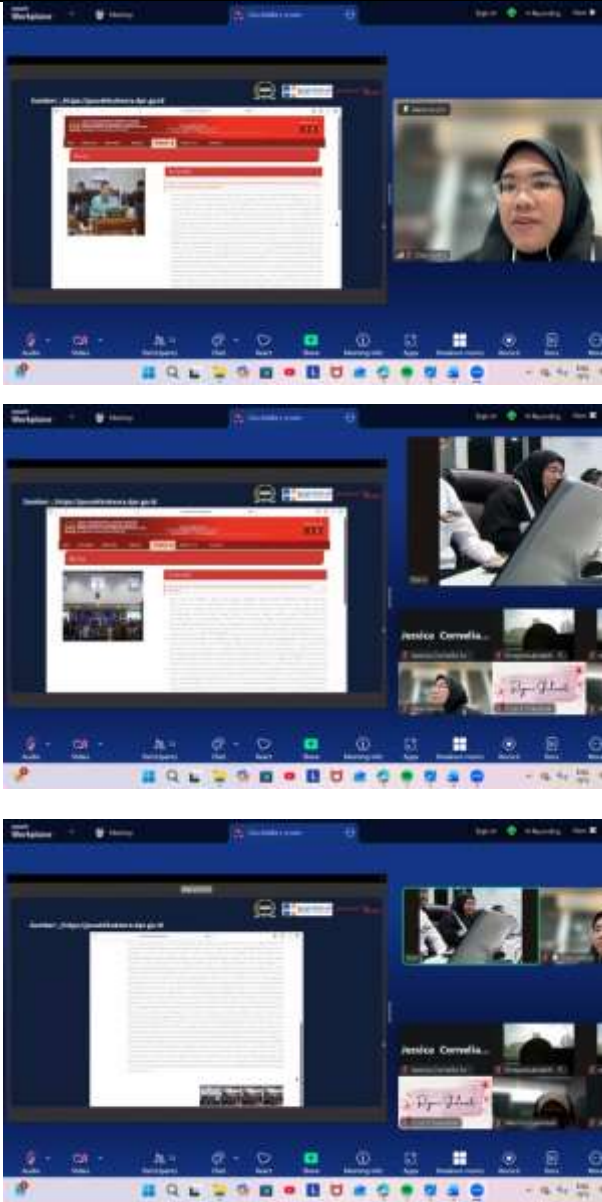
NIP : 199301282025062001

Unit Kerja : Pusat Perancangan undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,
industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra)

Isu : Belum optimalnya publikasi mengenai kabar terkini tentang hasil dari
Konsultasi Publik di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id)

Gagasan : Sosialisasi Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) di PUSAT PUU
EKKUINBANGKESRA

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Tahapan Kegiatan: - Menyiapkan bahan pemaparan sosialisasi. - Menyerahkan dan/atau menyampaikan hasil pembuatan Artikel Berita SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). - Menyusun Laporan. Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: - Dokumen digital untuk bahan paparan sosialisasi. - Dokumentasi. - Laporan Kegiatan. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Manajemen ASN:	Masukan dari Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H. Selaku Mentor, untuk masukan dan perbaikan di Minggu ke- 5: Mentor memberikan masukan berupa perbaikan untuk tugas yang sedang dikerjakan anak didik di minggu kelima. Dimana tahapan yang harus anak didik kerjakan di minggu kelima adalah: 1. Sosialisasi Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025, Hari Senin. Sosialisasi Program Aktualisasi ini diikuti oleh Seluruh Perancang Undang-Undang Ekkuinbangkesra dan 11 Orang CPNS yang menjadi pembicara untuk laporan dari hasil aktualisasi yang telah dijalani selama beberapa bulan terakhir. Berikut Bukti Terlampir:

a. Menyiapkan bahan. Paparan untuk sosialisasi melalui digital merupakan bentuk pembiasaan diri melakukan persiapan yang baik sebelum pelaksanaan kegiatan dapat mendorong terciptanya hasil kerja ASN yang lebih baik. b. Sesuai dengan asas akuntabilitas dalam Pasal 2 UU ASN, maka hasil kerja yang dilakukan perlu untuk disosialisasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada para Perancang Undang-Undang yang berada di EKKUINBANGKESRA. c. Sesuai dengan asas akuntabilitas, bahwa setiap hasil kerja dan perilaku kerja ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. SMART ASN: a. Mengimplementasikan digital skill dengan melakukan input hasil kerja berupa prototype Artikel Berita di Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id). b. Seorang SMART ASN salah satunya ditunjukan dengan jiwa kewirausahaan yang diantaranya dengan ditandai sikap keberanian dan kreativitas. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga menunjukan adanya hospitality agar materi yang disamain dapat diterima dengan baik.	 2. Update hasil survey dari kedua artikel yang telah terpublikasi • Telah dilaksanakan survey melalui google form atas program penulis yang diikuti oleh beberapa pihak: a) Pihak Internal Perancang Undang-Undang; b) Pihak Internal Pegawai DPR RI; dan c) Masyarakat Umum. • Google Form disebar pada tanggal 4 November 2025, dihari Selasa dan dibuka sampai tanggal 6 November 2025.
--	---

c. Salah satu cerminan SMART ASN adalah mempunyai sikap profesionalisme dengan menyelesaikan tugas sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi: Kegiatan ini juga sesuai dengan visi-misi PUU Ekkuinbangkesra, yaitu Menjadikan Pusat Perancangan PUU Ekkuinbangkesra sebagai organisasi pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancang Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Penguatan Nilai BerAKHLAK: a. Kompeten: Menunjukkan perilaku ASN yang kompeten dalam melaksanakan tugas kualitas terbaik. b. Berorientasi Pelayanan Sosialisasi penyampaian hasil pembuatan kolom berita beserta artikel berita pada Website SIMAS PUU (puuekkukesra.dpr.go.id) mencerminkan ASN yang berorientasi pelayanan agar Perancang Undang-Undang (PUU EKKUKESRA) lainnya juga mendapatkan pemahaman yang sama. c. Adaptif:	• Survey ini mendapatkan jawaban dari 107 orang, yang terdiri dari pihak internal dan eksternal. 3. Menyusun laporan dari hasil survey Berikut bukti survey yang telah didapatkan oleh penulis: 1. Seberapa mudah Anda menemukan berita di halaman SIMAS PUU (https://puuekkukesra.dpr.go.id/) ? 106 jawaban: <table><tr><th>Level Kemudahan</th><th>Jumlah Jawaban</th><th>Persentase</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>3.7%</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>3.7%</td></tr><tr><td>3</td><td>12</td><td>11.3%</td></tr><tr><td>4</td><td>44</td><td>40.7%</td></tr><tr><td>5</td><td>44</td><td>40.7%</td></tr></table> Hasil aktualisasi yang disusun, dapat diakses melalui https://puuekkukesra.dpr.go.id (Jika halaman website sedang ada perbaikan, maka contoh berita a...berikan manfaat yang berarti bagi penelitian ini. 106 jawaban: <table><tr><th>Level Kemudahan</th><th>Persentase</th></tr><tr><td>1</td><td>106 (100%)</td></tr></table> 2. Bagaimana menurut Anda, Mengenai isi berita pada website SIMAS PUU (https://puuekkukesra.dpr.go.id/) ? 106 jawaban: <table><tr><th>Kategori</th><th>Persentase</th></tr><tr><td>Informatif</td><td>60.2%</td></tr><tr><td>Cukup Informatif</td><td>37%</td></tr><tr><td>Kurang Informatif</td><td>2.8%</td></tr></table>	Level Kemudahan	Jumlah Jawaban	Persentase	1	4	3.7%	2	4	3.7%	3	12	11.3%	4	44	40.7%	5	44	40.7%	Level Kemudahan	Persentase	1	106 (100%)	Kategori	Persentase	Informatif	60.2%	Cukup Informatif	37%	Kurang Informatif	2.8%
Level Kemudahan	Jumlah Jawaban	Persentase																													
1	4	3.7%																													
2	4	3.7%																													
3	12	11.3%																													
4	44	40.7%																													
5	44	40.7%																													
Level Kemudahan	Persentase																														
1	106 (100%)																														
Kategori	Persentase																														
Informatif	60.2%																														
Cukup Informatif	37%																														
Kurang Informatif	2.8%																														

Nilai adaptif mencerminkan bahwa perubahan kearah yang lebih baik merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, inovasi perubahan yang ada perlu diimbangi dengan kemampuan diri untuk menyesuaikan diri dan berkembang.

d. Harmonis & Kolaboratif

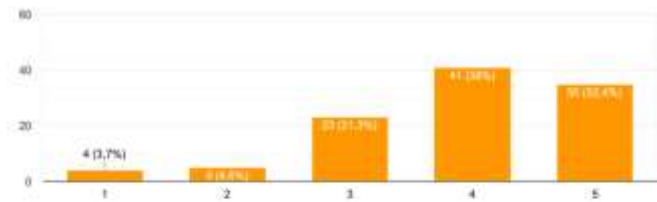
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud perilaku yang harmonis dan kolaboratif dengan melibatkan para Perancang Undang-Undang untuk menyamakan pandangan juga membangun lingkungan kerja yang suportif.

e. Akuntabel

Penyusunan laporan kegiatan meruoakan wujud sikap dari nilai akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan.

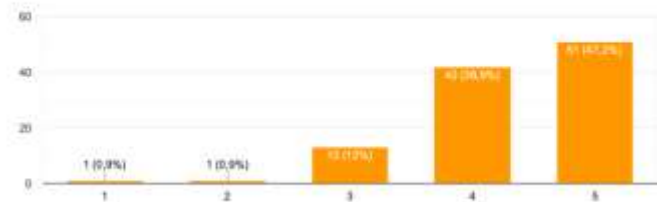
3. Seberapa menarik tampilan visual berita (gambar, tata letak, warna) ?

138 jawaban



4. Apakah berita yang dipublikasi mencerminkan nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)?

138 jawaban



5. Apakah Bapak/Ibu/Mas/Mba menyetujui bahwa optimalisasi Publikasi Berita pada Website SIMAS PUU (<https://puuekkukesra.dpr.go.id/>) dan diaktualisasikan di Pusat PUU EKKUINBANGKESRA?

138 jawaban



Nama Lengkap (Beserta Gelar)

107 jawaban

Yulianti Veronica Nababan, S.H.
Achmad Apriyanto SH
Nurul Maslydah Panigoro, S.H
rita ariyulinda, SH, MH
Rahman F Nasution, S.H.
Adinda Octavia Putri Paserbu, S.H.
Busro, A.Md
Vikrido Immanuel S.I Kom
Farah Dya Yasmine, S.H.

		Unit Kerja (Tempat Kerja) 107 jawaban 1. Sekretariat Dukungan Kabinet 2. PT Krakatau Saja Industri 3. PT Adira Dinamika Multifinance,Tbk 4. PUU POLHUKHAM 5. Dinas pendidikan Kabupaten Bogor 6. PAUD AL MUHARRAM 7. Pusat PUJ Bid, BakuinbangKeara 8. Haikal&Partners Lawfirm 9. Kemendagri - Dukcapil Jabatan 98 jawaban 1. Pengelola Konten Internet 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 3. Perancang PUU 4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama 5. Guru 6. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama 7. Perancang UU 8. Officer 9. perancang UU Madya Saran Bapak/Ibu/Mas/Mba untuk meningkatkan kualitas publikasi berita di Website SIMAS PUU (https://puuekkukesra.dpr.go.id/) : 93 jawaban 1. sudah bagus 2. Publikasi berita perlu lebih informatif, konsisten, menarik secara visual, dan mudah diakses oleh publik. 3. Artikel dengan gaya bahasa yg mudah dipahami dan tidak terlalu banyak agar org mudah membaca 4. Beritanya bisa dibuat menarik, bahasanya lebih mudah dipahami, dan tampilan websitenya dibuat lebih rapi serta mudah diakses. 5. cukup 6. Perbanyak konten 7. Sudah baik dan ditingkatkan 8. Teks Berita Pakai Rata Kiri Kanan terlalu Flat. Mungkin tetap pakai Paragraf Menorok, agar mudah dan enak dibaca. Secara Tampilan OK, namun karena halaman website belum bisa saya buka atau akses, jadi hanya sekedar itu aja untuk sarannya.
--	--	---

Jakarta, 07 November 2025

Mengetahui,

Mentor

Coach





.....
Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si.

.....
Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H

Lampiran 4. Laporan Singkat Sosialisasi Hasil Aktualisasi



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO Jakarta KODE POS:10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT SOSIALISASI HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS DI PUSAT PUU EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hari, tanggal : Jum'at, 3 November 2025

Agenda : Sosialisasi Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS di Pusat PUU
Ekkuinbangkesra

I. PENDAHULUAN

Pada hari Jum'at tanggal 3 November 2025 pukul 08.00 WIB, Sosialisasi hasil aktualisasi pelatihan dasar CPNS dibuka oleh Ibu Dr. Wiwin Sri Haryani, S.H., M.H. Selaku Kepala Pusat PUU Ekkuinbangkesra dengan metode sosialisasi dilakukan bergiliran yang dilakukan oleh 11(sebelas) CPNS di lingkungan Pusat PUU Ekkuinbangkesra dengan urutan presentasi: Nadia Fatikha Rachm, S.H., Gavin Laudza Saktya Utama, S.H., Adinda Octavia Putri Pasaribu, S.H., Desti Ananda Putri, S.H., Imron Amrullah, S.H., Dea Adelia, S.H., Muhamad Fahmi, S.H., Jessica Cornelia Ivanny, S.H., Farah Diya Yasmine, S.H., Cindy Caroline Manalu, S.H., Adinda Rabiki Mardiah, S.H.

II. PEMBAHASAN

Presentasi dimoderatori oleh Atisa Praharini, S.H., M.H. dengan metode presentasi, penguatan oleh Meirina Fajarwati, S.H., M.H. Selaku Mentor, sesi tanya jawab. Terhadap hasil aktualisasi saya mendapatkan tanggapan sebagaimana berikut:

1. Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. : Perbaikan untuk penambahan kata “Pusat” didepan kata PUU.
2. Bapak Akhmad Aulawi, S.H., M.H. : Koordinasi yang jelas untuk pembuatan berita yang Baik dan Benar, Keberlanjutan dengan konsisten melakukan publikasi berita, Menyesuaikan layout yang sesuai.
3. Mba Atisa Praharini, S.H., M.H. : Untuk bisa berkelanjutan ada baiknya didiskusikan mengenai kesinambungan antara berita di Instagram dan Website Pusat PUU Ekkukesra.
4. Ibu Khopiatuziadah, S. Ag., LL.M : Keberlanjutan dan konsistensi dalam pembuatan berita harus dijaga.
5. Bapak Bagus Prasetyo, S.H., M.H. : Pemilihan berita dengan tema yang menarik.
6. Bapak Zaqiu Rahman, S.H., M.H. : Keberlanjutan akan berita ini menjadi penting dan penyusunan berita secara baik dan benar akan menambah nilai dari publikasi berita ini.

III. KESIMPULAN

Penting untuk melakukan publikasi yang berkelanjutan dengan menggunakan tata bahasa berita, susunan berita dan layout yang jelas. Perbaikan tahap per tahap sangat diperlukan, dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Pemilihan tema atas berita perlu diperhatikan dan pelaksanaan dalam pembuatan berita yang berkelanjutan dibutuhkan konsistensi dan tanggung jawab.

Jakarta, 3 November 2025

Mentor



Ibu Meirina Fajarwati, S.H., M.H
NIP. 199105062014022002

Lampiran 5. LABN

LAPORAN PELAKSANAAN AKSI BELA NEGARA PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2025

Angkatan	:	XVIII
Nama	:	Dea Adelia
Nomor daftar Hadir	:	5
Instansi/Unit Kerja	:	Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Perancang Undang-Undang Ekuinbangkesra
Nama Mentor	:	Meirina Fajarwati, S.H., M.H.
Jabatan Mentor	:	Perancang Undang-Undang Ahli Muda
Nilai dari Mentor	:	96

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1	Cinta Tanah Air	Menjaga dan Melestarikan Lingkungan	Menjaga ruang kerja tetap bersih	Di kantor	08.00-15.00		

Lampiran 5. LABN

			Mengurangi penggunaan Plastik	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00				
		Menggunakan Produk Dalam Negeri	Membeli Produk Dalam Negeri	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00				

Lampiran 5. LABN

			Mema kai Batik	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		
2	Sadar Berbangsa dan Bernegara	Kesadaran akan Keberagaman	Menja lin hubun gan baik denga n siapa pun	Di kantor/ lingkungan rumah	08.00-15.00		

Lampiran 5. LABN

			Meng hargai perbe daan penda pat	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		
		Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan	Melak ukan kajian terhad ap naska h akade mik dan ranca ngan undan g- undan g	Di kantor	08.00-15.00		

Lampiran 5. LABN

			Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	Di kantor	08.00-15.00			
3	Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara	Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar	Menjalankan ibadah mengaji dzikir pagi	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00			

Lampiran 5. LABN

			Mendengar kan terkait kajian ibada h	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00			
		Memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Bersikap sopan	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00			

Lampiran 5. LABN

			Menol ong teman	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		
4	Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara	Berani membela kebenaran dan keadilan	Meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		

Lampiran 5. LABN

			Menggunakan media sosial secara bijak	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		
		Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran.	Mengerjakan tugas kantor	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		

Lampiran 5. LABN

			Kesia pan untuk bekerj a di luar jam kerja apabil a diperl ukan.	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		
--	--	--	--	------------------------------------	-------------	---	---

Lampiran 5. LABN

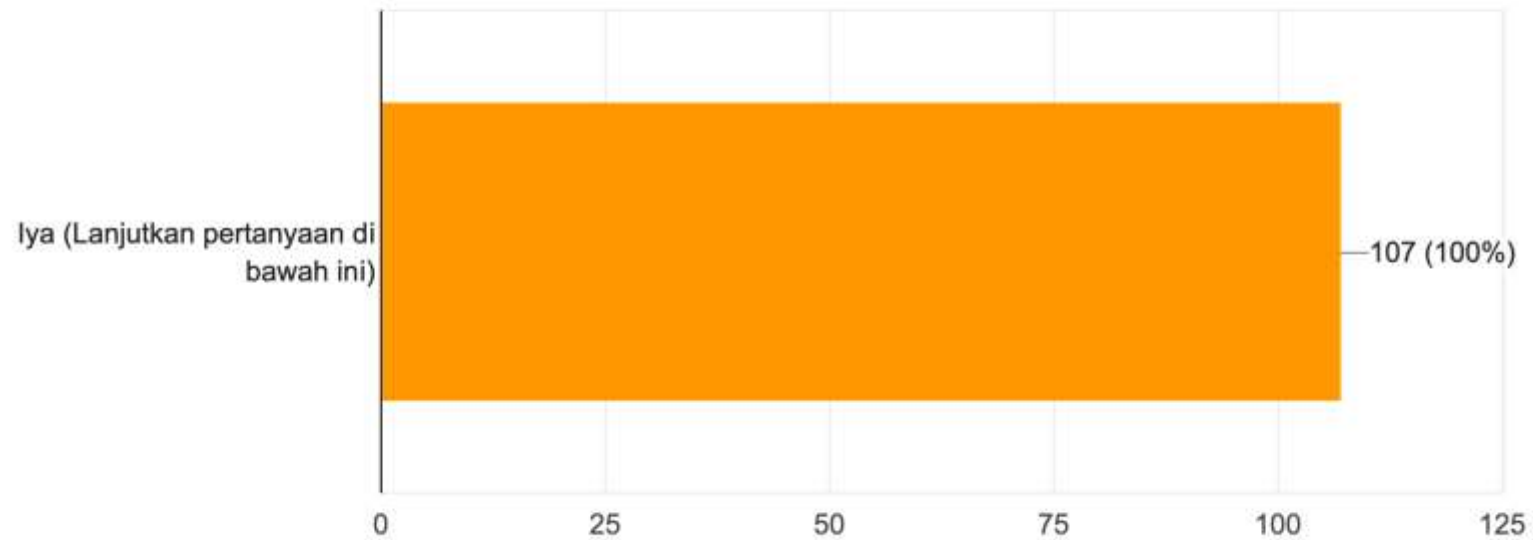
5	Kemampuan Awal Bela Negara	Memiliki Wawasan Kebangsaan	Mempelajari nilai-nilai bela negara	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		
			Menggunakan Produk Dalam Negeri	Di kantor / lingkungan rumah	08.00-15.00		

Lampiran 5. LABN

		Menjaga Kesehatan sehingga memiliki Kesehatan fisik dan mental yang baik	Melakukan olahraga secara rutin	Di kantor/ lingkungan rumah	08.00-15.00			
			Mendengarkan terkait kajian ibadah	Di kantor/ lingkungan rumah	08.00-15.00			

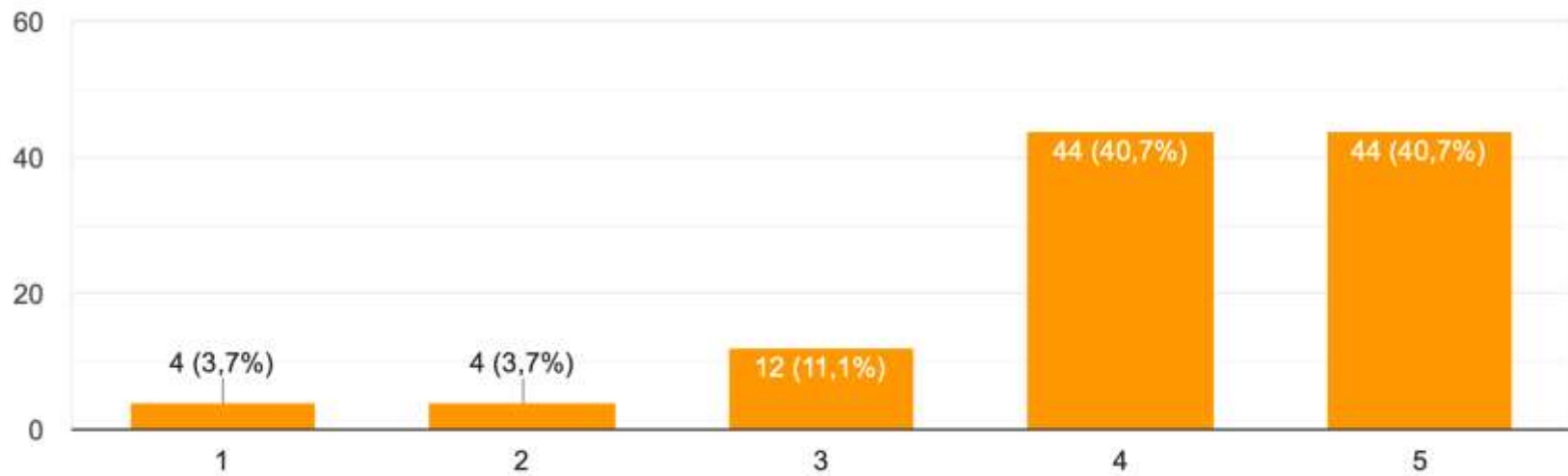
Hasil aktualisasi yang disusun, dapat diakses melalui <https://puuekkukesra.dpr.go.id> (Jika halaman website sedang ada perbaikan, maka contoh berita a...berikan manfaat yang berarti bagi penelitian ini.

107 jawaban



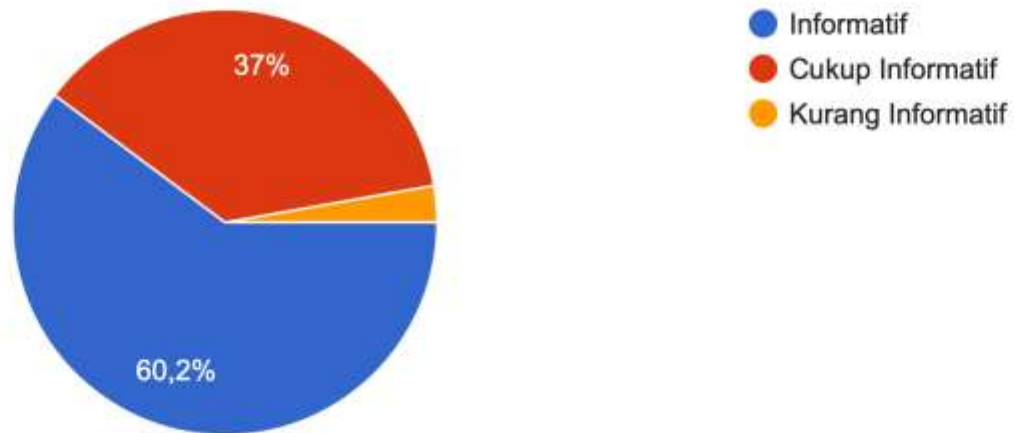
1. Seberapa mudah Anda menemukan berita di halaman SIMAS PUU
(<https://puuekkukesra.dpr.go.id/>) ?

108 jawaban



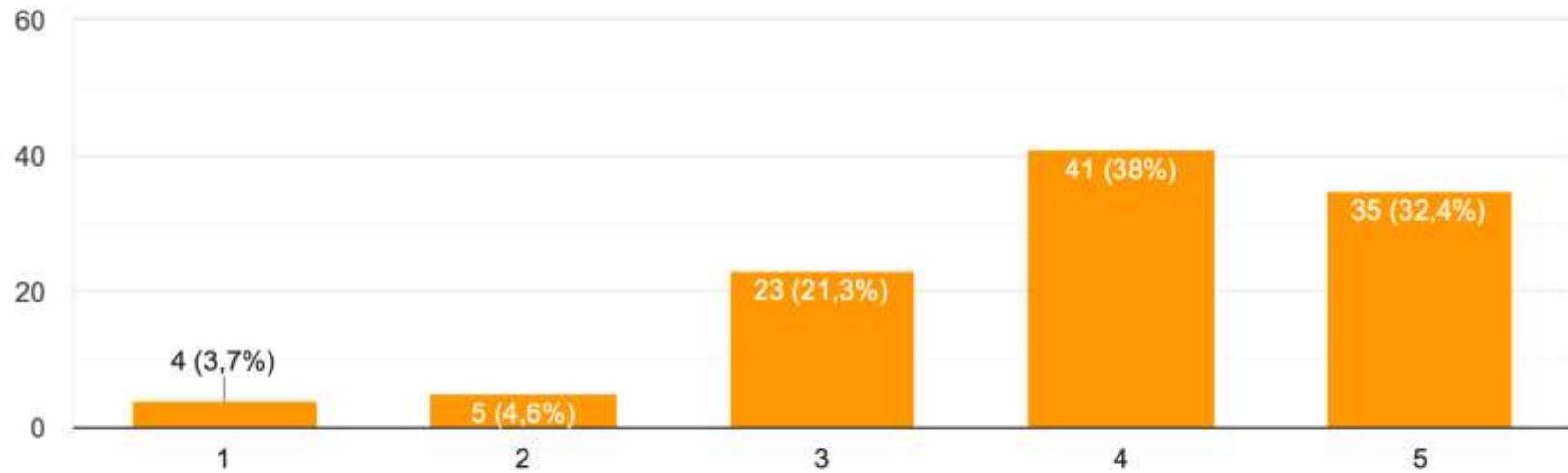
2. Bagaimana menurut Anda, Mengenai isi berita pada website SIMAS PUU (<https://puuekkukesra.dpr.go.id>) ?

108 jawaban



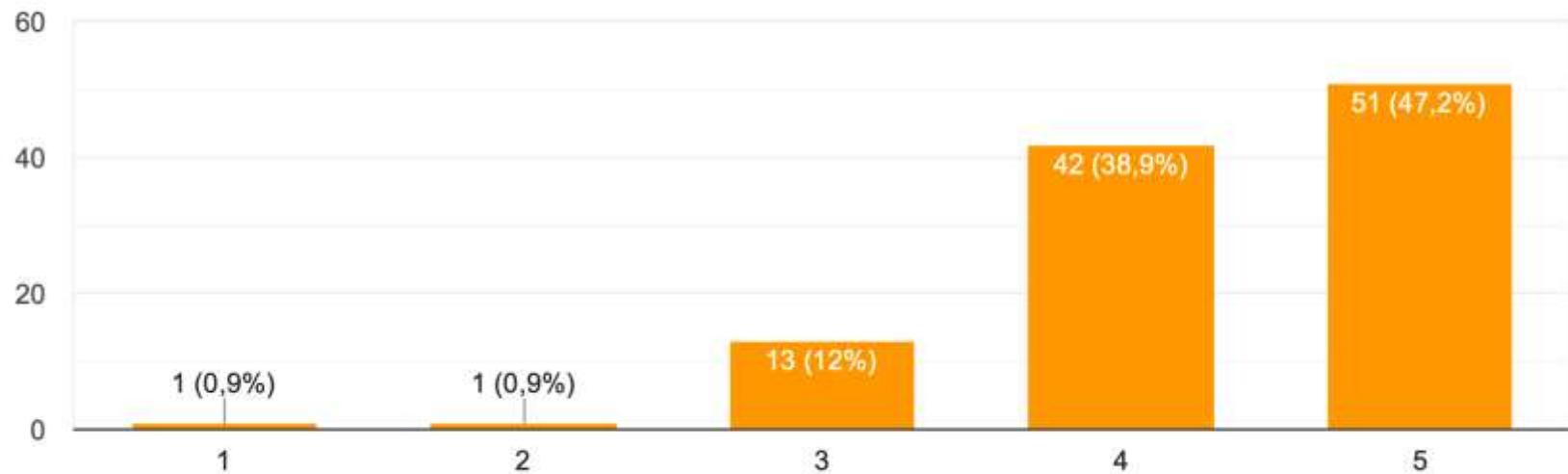
3. Seberapa menarik tampilan visual berita (gambar, tata letak, warna) ?

108 jawaban



4. Apakah berita yang dipublikasi mencerminkan nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)?

108 jawaban



5. Apakah Bapak/Ibu/Mas/Mba menyetujui bahwa optimalisasi Publikasi Berita pada Website SIMAS PUU (<https://puuekkukesra.dpr.go.id>) da...diaktualisasikan di Pusat PUU EKKUINBANGKESRA?

108 jawaban

